

**PELEMBAGAAN PARTAI ISLAM
(Studi Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Semarang tahun 2014 – 2019)**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata1 Dalam Ilmu Politik



Disusun Oleh:
Setyo Wahyu Naryono
1506016006

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo Wahyu Naryono
NIM : 1506016006
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PELEMBAGAAN PARTAI ISLAM (Studi pelebagaan partai persatuan pembangunan kabupaten semarang tahun 2014-2019)

Secara keseluruhan adalah hasil karya sastra sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 17 April 2020
Pembuat pernyataan,



Setyo Wahyu Naryono
NIM: 1506016006

PENGESAHAN

SKRIPSI PELEMBAGAAN PARTAI ISLAM

(Studi Kasus Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten
Semarang Tahun 2014-2019)

Disusun Oleh:
Setyo Wahyu Naryono
1506016006

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 17 April
2020 dan dinyatakan **LULUS**
Susunan Dewan Penguji



Dewan Penguji I

H. Amin Fauzi, M.Ag
NIP. 106142000031002

Penguji III

Dr. H. Moh Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003
Pembimbing I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

Sekretaris/Penguji II

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

Penguji IV

H. Adib, S.Ag., M.Si
NIP. 197303202002121002
Pembimbing II

Rofiq, M.Si
NIP. –

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Proposal Skripsi
Kepada.
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Setyo Wahyu Naryono
NIM : 1506016006
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bidang Substansi Materi
& Tata Tulis



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP: 19680505 199503 1002

Semarang, 30 Maret 2020
Pembimbing,
Bidang Metodologi



Rofiq, M.Si
NIP: -

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta Bapak Sunarno dan Ibu Sri Wahyuni yang telah menjadi motivator terhebatku, membesarkanku, mendidikku, mengarahkan langkahku, dan senantiasa selalu berdoa yang terbaik untukku

Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Memayu Hayuning Bawono”

Artinya: Manusia Hidup di Dunia Harus Mengusahakan
Keselamatan, Kebahagiaan dan Kesejahteraan di Muka Bumi
(Rahmatan lil-‘alamin)

-Falsafah Sunan Kalijaga

ABSTRAK

Pelebagaan partai politik hingga kini masih belum menjadi prioritas utama dalam upaya melembagakan demokrasi di Indonesia. Sering kali studi tentang pelembagaan partai politik hanya mengukur kuat dan lemahnya pelembagaan partai, tanpa melihat bagaimana proses pelembagaan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelembagaan PPP Kabupaten Semarang tahun 2014-2019.

Untuk mengurai bagaimana pelembagaan PPP Kabupaten Semarang tahun 2014-2019, penelitian ini menggunakan konsep pelembagaan Randal dan Svansand (2002) yang cenderung melihat pelembagaan partai sebagai sebuah pola pengelolaan partai berdasarkan empat dimensi, yaitu dimensi kesisteman, nilai, otonomi, dan pengetahuan public.

Hasil penelitian bahwa dari sisi pelembagaan PPP Kabupaten Semarang sudah bisa membangun pelembagaan dengan baik pada pemilu 2019 dengan perolehan suara yang hamper dua kali lipat dari perolehan suara pada pemilu 2014. Selain itu diukur dari teori pelembagaan partai politik Randall dan Svansand. Berikut beberapa hasil keberhasilan dan kegagalan partai dalam membangun kelembagaan. Pertama, dalam demokrasi partai, PPP Kabupaten Semarang selalu mengedepankan musyawarah dan mengacu pada AD/ART. Kedua, pengaruh klientisme dalam partai masih tinggi. Ketiga, pengambilan keputusan PPP kabupaten Semarang Sepenuhnya di pegang oleh DPC Kabupaten Semarang. Keempat, PPP Kabupaten Semarang secara kelembagaan sampai saat ini memiliki basis yang kuat. Kelima, pelembagaan PPP Kabupaten Semarang terdapat kurang pada proses kaderisasi dan pendanaan yang tidak berjalan dengan baik.

Studi ini memberikan gambaran bahwa untuk melihat kemampuan partai, tidak hanya dapat dilihat pada level nasional. Karena, peran partai di daerah akan menentukan keberhasilan partai di akar permukaan. Dengan partai politik tingkat lokal memperhatikan pelembagaan partai dengan baik maka kaidah-kaidah partai bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Pelebagaan partai, PPP, Kabupaten Semarang*

ABSTRACT

The institutionalization of political parties has not become a top priority in efforts to institutionalize democracy in Indonesia. Usually, institutionalization of political parties only measure the strengths and weaknesses of party institutionalization, without looking at how the institutionalization process is, this study wants to find out how the institutionalization of Partai Persatuan Pembangunan in Semarang region in 2014-2019.

To elaborate on how the institutionalization of Partai Persatuan Pembangunan Semarang in 2014-2019, this study used the concept of institutionalization of Randal and Svansand (2002) who tend institutionalization as a party management pattern based on four dimensions, namely the dimensions of the system, values, autonomy, and public knowledge.

The results showed that in terms of institutionalizing parties of *Persatuan Pembangunan* in Semarang region, the institution was able to establish institutionalization well in 2019 election with double votes in 2014 election. Besides it was measured from the theory of political party institutionalization of Randall and Svansand. Here are some results of the successes and failures of parties in building institutions. First, in party democracy, *PPP* in Semarang regency always prioritizes discussion and refers to AD/ART or Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. second, the influence of clientelism in the party is still high. Third, decision-making process of *PPP*'s party is fully conducted by DPC of Semarang Regency. Fourth, Development Unity Party in Semarang Regency as an institution has to date a strong basis. Fifth, the institutionalization of the development Unity Party is lacking in the regeneration and funding process that is not going well.

This study provided an illustration to see establishment of the party, not only can be seen at the national level because the role of the parties in region will determine the success of the party at surface. With local level political parties paying close attention to party institutionalization, party rules can work well.

Keywords: Party institutionalization, PPP, Semarang Regency

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil'alamina yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "Pelebagaian Partai Islam (Studi Kasus Pelebagaian Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang 2014-2019)" disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Politik (IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Skripsi yang penulis susun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak sehingga segala kendala dan hambatan dapat teratasi. Atas bantuan yang telah diberikan selama penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. H.Adib, S.Ag.,M.Si dan Bapak Muhammad Mahsun, MA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan, dukungan dan nasehat.

4. Dr. Nur Syamsudin, M.Ag dan Bapak Rofiq, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Nurul Huda selaku Wakil DPRD dan Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Bapak Tri Pranoto selaku Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Bapak Burhan selaku Anggota DPC PPP Kabupaten Semarang, dan Mas Yogi Pratama selaku Anggota DPC PPP Kabupaten Semarang yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
8. Yang teristimewah kedua orang tuaku Bapak Sunarno dan Ibu Sri Wahyuni serta seluruh keluarga yang tiada henti-hentinya mencurahkan doa, kasih sayang serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Keluarga Besar UKM PSHT UIN Walisongo Semarang, Pengurus UKM PSHT periode 2019, PSHT Cabang Kota Semarang, Saudara

leting pengesahan 2017 dan teman setia *Siti Zumrohatun*, terimakasih telah menemani dan berproses dalam tujuan menjadi manusia berbudi pekerti luhur tahu benar dan tahu salah serta bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

10. Teman-teman Ilmu Politik dan HMJ Ilmu Politik, terimakasih telah menjadi bagian dari Politik kalian, sekarang saya tahu pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan.
11. Teman-teman IMADE, terimakasih telah memberi banyak pengetahuan dan pengalaman dalam kedaerahan untuk penulis senantiasa mewujudkan cita menjadi mahasiswa yang Intelektual, Kritis, dan Agamis.
12. Teman-teman KKN Posko 59 yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis di 45 hari bersama dalam pengabdian masyarakatnya di Kelurahan Pedurungan Kidul, Pedurungan Kota Semarang

Semarang, 12 April 2020

Penulis,

Setyo Wahyu Naryono
NIM. 1506016006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTO	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori.....	28
1. Partai Politik Islam	28
2. Pelembagaan Partai Politik.....	31
a) Derajat Kesisteman	35
b) Derajat Identitas Nilai	38
c) Derajat Otonomi.....	42
d) Derajat Pengetahuan Publik	45

BAB III : GAMBARAN OBYEK DAN DATA

A. PPP Sebagai Partai Islam.....	48
1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan	48
2. Makna Lambang	51
3. Platform Partai	52
4. Asas, Sifat, dan Prinsip Perjuangan PPP.....	54
5. Visi dan Misi DPC PPP Kabupaten Semarang ..	55
6. Program Kerja PPP	58
B. PPP Kabupaten Semarang	61
1. Struktur Kepengurusan Partai	62
2. Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang	65
C. Dinamika Politik Kabupaten Semarang	68
D. Dinamika PPP.....	73
1. Dinamika PPP Nasional	73
2. Dinamika PPP Kabupaten Semarang.....	86
E. Profil Kabupaten Semarang.....	84
1. Sejarah.....	84
2. Wilayah Kabupaten Semarang.....	85
3. Topografi.....	90
4. Pemerintah Kabupaten Semarang	91
5. Kependudukan	95
6. Agama	98

BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Pelembagaan Partai	89
1. Derajat Kesisteman	89
a. Demokrasi Internal	89
b. Keutuhan Organisasi	92
c. Keanggotaan dan Kaderisasi	97
d. Peran dan Pengaruh Tokoh.....	103
2. Derajat Penanaman Nilai.....	105
a. Basis Dukungan Partai.....	107
b. Pengaruh Klientalisme dalam Partai.....	109
3. Derajat Otonomi.....	112
a. Keuangan Partai	58
b. Pengambilan Keputusan Partai.....	66
4. Derajat Pengetahuan Publik.....	68
5. Keuangan Partai.....	58
a. Kiprah Partai dalam Politik Lokal.....	58
b. Kiprah Partai di Masyarakat.....	119
B. Faktor-Faktor Tantangan dan Hambatan dalam Pelembagaan Partai.....	126
1. Tantangan Internal.....	126
a. Kaderisasi SDM.....	127
b. Kontruksi Ideologi.....	128
c. Basis Data.....	132
d. Basis Financial.....	133
2. Tantangan Eksternal.....	134

a. Ekonomi.....	135
b. Keislaman.....	136

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	142
C. Kata Penutup.....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara PPP di Kabupaten.....	9
Grafik 1.2 Rekapitulasi Perolehan Suara PPP di Nasional.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 logo Partai Persatuan Pembangunan.....	51
Gambar 3.2 Peta Wilayah Kabupaten Semarang	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teori Pelembagaan Randal dan Svansand.....	30
Tabel 3.1 Susunan Dan Personalia Pengurus DPC PPP Kabupaten Semarang Masa Bakti 2016-2021	62
Grafik 3.2 Rekapitulasi Pemilu 2014	69
Grafik 3.3 Rekapitulasi Pemilu 2019	70
Tabel 3.4 Nama Kecamatan Beserta Luas Wilayah	87
Tabel 3.5 Nama Kecamatan Beserta Desa Dan Kelurahan	89
Tabel 3.6 Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Semarang 2014.....	92
Tabel 3.7 Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Semarang 2019.....	93
Tabel 3.8 Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu di Kabupaten Semarang 2019	94
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dikabupaten Semarang 2014-2018.....	96

Tabel 3.10 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Semarang.....98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengantar Penelitian Skripsi

Lampiran 2 : Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Kesbangpol

Lampiran 4 : Formulir Permohonan Informasi Publik

Lampiran 5 : Permohonan Penelitian Skripsi

Lampiran 6 : Daftar informasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim orde baru melahirkan era reformasi dan membuka kran liberisasi politik. Era ini ditandai Antara lain oleh hadirnya kembali wacana Islam politik diapnggung politik nasional, dan juga oleh transformasi dalam pengelolaan artikulasi politik masyarakat. Kebangkitan Islam dipanggung politik yang baru ini di bentuk salah satunya sebagai kekuatan politik dan terefleksikan pada kelahiran pada pada partai politik yang mengusung bendera Islam.¹

Setidaknya ada dua hal yang melatari kebangkitan Islam pilitik di era reformasi. Pertama mayoritas penduduk Indonesia adalah agama Islam dan karena mereka memandang penting transformasi nilai nilai Islam dalam kehidupan social politik. Kedua dari perspektif historis, Islam merupakan kekuatan pilitik potensial ini mendorong berbagai arus yang mencoba membangkitkan kembali romantisme sejarah tersebut dan sekaligus menggunakan sebagai basis baru kekuatan politik dalam panggung politik nasional kontemporer.²

Apabila kita terlisik, perkembangan partai politik era reformasi belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa sehingga partai politik lebih

¹ Abdu, Aziz, *Politik Islam Politik, Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006) h. 1

² *Ibid*, h 2

diarahkan pada kepentingan pelanggaran kekuasaan penguasa (*status quo*). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang besar namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik. Partai politik dewasa ini belum memperlihatkan akuntabilitas kepada konstituen.

Sangat menarik bila kita memperhatikan bagaimana posisi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mendasarkan secara formal pada Islam, negara ini memiliki sistem demokrasi. Eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan keunikan tersendiri sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dan berpenduduk muslim terbesar di dunia ini.³

Tumbuh dan berkembangnya partai politik di Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan dimulai setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945 Maklumat tersebut berisi bahwa Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala paham yang ada dalam masyarakat Selanjutnya maklumat itu memuat bahwa pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilakukannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.⁴

³ Zuly, Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). h. 194.

⁴ Lili, Romli Masalah Kelen bagaan Partai Politikdi Indonesia Pasca Orde Baru. H. 21

Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Partai politik adalah salah satu yang dimaksud, yang memiliki ragam fungsi, *platform* dan dasar pemikiran.⁵ Setelah tumbang rezim Soeharto merupakan babak baru bagi sejarah politik Indonesia. Babak baru ini memberikan angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini terkekang kebebasannya dalam berpolitik.

Partai politik mempunyai peran yang besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi dalam suatu negara. Karena, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mendasarkan secara formal pada Islam, negara ini memiliki keunikan tersendiri sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dan berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Pada umumnya diambil suatu aksiomasi bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya partai politik.⁶ Partai politik sering dianggap sebagai faksi (kelompok-kelompok yang saling bertentangan dalam partai) dan tidak dapat dipercaya.⁷

Pascareformasi 1998 di Indonesia terjadi banyak perubahan sosial politik, perubahan yang terjadi sering kali berada diluar dugaan para pengamat. Studi ini mengkaji tentang pelebagaan Partai Islam dengan fokus tentang pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang

⁵ Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).h. 15

⁶ Amal Ichlasul, *Teori-Teori Muthakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: tiara wacana, 2012), h. 19

⁷ *Ibid*, h. 21.

dari tahun 2014 – 2019. Pelembagaan partai politik menjadi penting untuk dilakukan, agar partai politik dapat berperan dan berfungsi dengan baik.⁸

Partai politik pada era reformasi juga terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai. Keputusan tertinggi biasanya berada pada seseorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Persoalan mekanisme internal dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan, dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah.

Seperti yang disinggung sebelumnya oleh Abu Bakar dalam jurnalnya “Politik Dinasti Dan Pelembagaan Partai Politik” bahwa kehadiran partai politik adalah keniscayaan dalam sebuah Negara yang demokratis. Ini dikarenakan partai politik sebagai institusi yang diharapkan sebagai saluran bagi negosiasi kekuasaan antara masyarakat dan Negara dengan menggunakan pemilihan umum sebagai alat untuk menduduki posisi kunci yang pada akhirnya menjadi tempat bagi negosiasi tersebut.⁹ Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi.

⁸ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*.

⁹ Abu, Bakar, “Politik Dinasti Dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman Dpc Pdp Dan Keluarga Banteng Di Kepulauan Selayar” Vol. 1, No. 2, 2013, h. 108.

Dalam demokrasi, lembaga partai politik merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan menjadi pilar dari demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), tujuan khusus dibentuknya partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Tujuan ini sejatinya berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan.¹¹

Pelebagaan partai politik menjadi fokus penelitian penulis. Dalam beberapa pengertian pelembagaan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengukur tingkat kematangan demokrasi. Karena partai politik jika dilihat dari asal usulnya, paling tidak dapat dijelaskan melalui tiga teori, kelembagaan, situasi historik, dan pembangunan.¹²

Studi ini mengkaji tentang pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2019 pasca ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi

¹⁰ Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Volume 04, No. 1 Tahun 2016

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 403.

¹² Cholisin dan Nasiwan, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012), h. 111.

tangkap tangan (OTT) KPK. Tetapi ada beberapa fakta sekaligus kejutan yang terjadi dalam Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Semarang menurut surat kabar yang beredar. Salah satunya adalah berdasarkan Pengumuman Nomor : 290/PL.01.7-Pu/3322/KPU.Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 Tingkat Kabupaten Semarang, perolehan kursi yang luar biasa di dapat oleh PPP. Yang pada pemilu periode sebelumnya hanya tiga kursi, dalam pemilu kali ini naik dua kali lipat menjadi enam kursi.¹³

Ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK disinyalir hal tersebut mempengaruhi turunnya perolehan suara PPP ditingkat nasional, namun sebaliknya kenaikan perolehan suara yang cukup luar biasa malah didapatkan di kabupaten Semarang pada pemilu 2019 kemaren. Kenaikan suara PPP dalam pemilu kali ini menunjukkan bahwa perolehan suara untuk PPP di Kabupaten Semarang itu tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Melihat kasus diatas cukup menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pelembagaan PPP di wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan ditingkat nasional berdasarkan hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret 2019, elektabilitas PPP berada di angka 2,7 persen dan menjadi salah satu dari tiga partai yang

¹³ Ranin, agung, “*Beberapa Parpol Memberikan Kejutan Dalam*”
<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/183504/beberapa-parpol-memberikan-kejutan, 02-11-2019>.

elektabilitasnya tak melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Meski demikian, jika ditambah dengan tingkat margin of error +/- 2,2 persen, ketiga parpol ini masih mempunyai peluang lolos ke Senayan.¹⁴ Walaupun hasil survei seperti yang disampaikan diatas, tapi hasil di wilayah kabupaten Semarang bahkan sebaliknya.

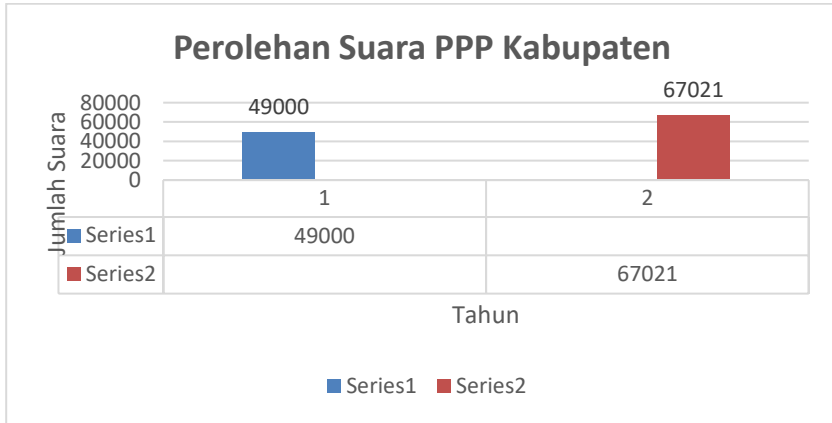
Hasil yang mengejutkan yang terjadi dalam Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Semarang menurut surat kabar yang beredar itu bertolak belakang dengan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Perolehan suara PPP pada Pileg 2019 mengalami penurunan. Pada Pileg 2019, PPP mengantongi 8.157.488 atau 6,53 persen suara. Kini, perolehan suaranya menurun menjadi 6.323.147 atau 4,52 persen suara. Perolehan suara PPP nyaris menyentuh ambang batas parlemen.¹⁵

¹⁴ Erdianto, nasional.kompas.com/read/2019/03/21/17205841/wasekjen-ppp-kami-mau-lolos-pemilu-bukan-lolos-survei, akses 18 Desember 2019

¹⁵ Jessi, Carina, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all.02-11-2019>

Grafik 1.1

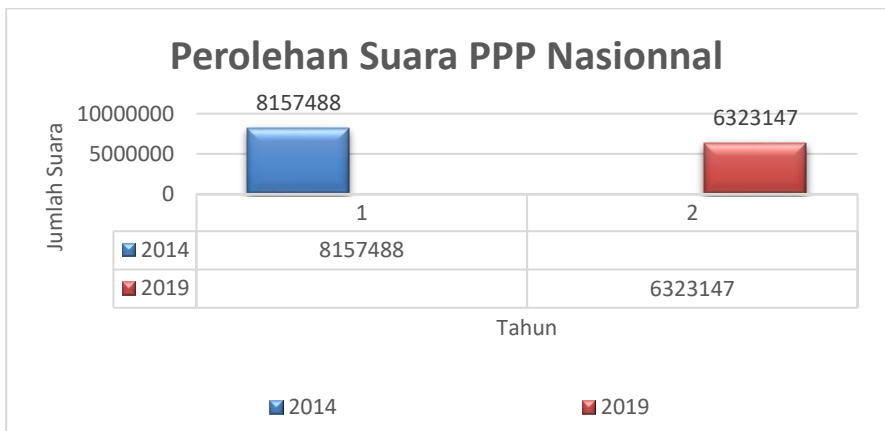
Rekapitulasi Perolehan Suara PPP di Kabupaten Semarang



Sumber : KPUD Kabupaten Semarang

Grafik 1.2

Rekapitulasi Perolehan Suara PPP di Nasional



Sumber : KPUD Kabupaten Semarang

Melihat diagram diatas, perolehan suara PPP di Kabupaten Semarang dalam pemilu 2019 naik menjadi 67.021 suara atau 6 kursi, dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya memperoleh 39.690 suara atau 3 kursi, menurut penulis ini merupakan indikasi adanya hasil dari pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang yang semakin baik. Jika dibandingkan dengan peolehan suara PPP ditingkat nasional yang pada tahun 2014 memperoleh 8.157.488 suara sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan memperoleh 6.323.147 suara. Hal ini di dapatkan karena ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) telah mempengaruhi perolehan suara PPP secara Nasional.

Akan tetapi keberhasilan kenaikan suara PPP di Kabupaten Semarang disinyalir adanya pelimpahan suara dari partai Islam lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Penulis tetap bahwa kenaikan suara PPP Kabupaten Semarang dalam pemilu 2019 adalah adanya pelebagaan partai yang mulai membaik, karena jika melihat hasil partai besar lainnya yaitu PKB dan PKS tidak adanya perubahan suara yang signifikan dari pemilu 2014-2019 di Kabupaten Semarang. Dari pemataran diatas tersebut menjadi hal yang menarik untuk dikaji, sehingga peneliti ingin mengkaji studi “*Pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pelebagaan PPP Kabupaten Semarang dari tahun 2014 – 2019?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelebagaan PPP Kabupaten Semarang dari tahun 2014 – 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses pelebagaan PPP Kabupaten Semarang dari tahun 2014 – 2019.
- b) Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelebagaan PPP Kabupaten Semarang dari tahun 2014 – 2019.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk teori-teori mengenai pelebagaan partai politik.
 - b) Menjawab fenomena sosial-politik yang ada.
 - c) Menunjukkan secara ilmiah bagaimana pelebagaan PPP dari tahun 2014 – 2019 di Kabupaten Semarang.

- d) Sebagai tambahan literatur serta bahan kajian Ilmu Politik dalam upaya perkembangan keilmuan khususnya mahasiswa program studi Ilmu Politik.
2. Manfaat Praktis
- a) Bagi mahasiswa dapat mengenalkan teori pelebagaan partai politik serta memberikan gambaran penerapannya dalam pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang.
 - b) Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu Politik.
 - c) Untuk sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.
 - d) Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik yang dianggap sama.
 - e) Membantu para perilaku politik pada khususnya maupun masyarakat awam pada umumnya untuk memahami pelebagaan partai politik.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Lutfi, Muhammad. 2012. Tesis yang berjudul *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai setelah kekalahan pada Pemilu 2009 serta melihat kendala dan faktor apa saja yang dihadapi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam proses pelebagaan partainya selama persiapan menghadapi pemilu pada 2009. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa partai Golkar belum berhasil membangun pelebagaan yang baik di Kabupaten Sinjai yang mengakibatkan kekalahan partai Golkar pada pemilu 2009. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai politiknya. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan dengan peneliti terdahulu adalah pada obyek penelitian peneliti yaitu bagaimana pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “Pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019” berbeda dengan penulisan skripsi terdahulu tersebut.

2. Hijriyah Y. 2013. Skripsi yang berjudul *Institusionalisasi Partai Nasdem di Kabupaten Gowa*. Penelitian skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Partai Nasdem dalam memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa upaya partai Nasdem memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa menggunakan teori pelebagaan. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti tulis adalah pada teori pelebagaan partai yang digunakan dalam skripsi ini. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti tulis dengan objek penelitian terdahulu adalah partai Nasdem dalam mencari jaringan untuk memperluas jaringannya di Kabupaten Goa, sedangkan yang peneliti tulis adalah bagaimana pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang dalam waktu 2014 – 2019 ini. Karena penulisan ini mengambil permasalahan tentang bagaimana pelebagaan partai, sehingga dapat di nyatakan bahwa penulisan ini berbeda dengan penulisan skripsi sebelumnya.
3. Natsir, Nurlatipah. 2016. Penelitian yang berjudul *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelebagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Dengan Konstituen*. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa lembaga partai politik merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan menjadi pilar dari demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan. Kemudian

perkembangan partai politik di Indonesia mengalami berbagai kendala, partai politik dianggap tidak atau kurang mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. terdapat suatu relasi antara electoral volatility dengan pelebagaan partai politik, lemahnya pelebagaan partai politik mengakibatkan tingginya angka electoral volatility. Electoral volatility berkaitan dengan hubungan antara partai dan konstituen. . Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada pelebagaan partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah bagaimana pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai persatuan pembangunan (PPP) di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.

4. Rowdotusya'adah. 2018. Skripsi yang berjudul *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

tidak terlembaganya partai politik memberikan pengaruh terhadap kemunculan faksi intra-partai. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah peneliti dahulu berfokus dalam pengaruh kemunculan faksi baru didalam sebuah partai. Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelebagaan Partai persatuan pembangunan (PPP) di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.

5. Fachri Setiadi. 2019. Skripsi yang berjudul *Pelebagaan partai kebangkitan bangsa pada tahun 2014 – 2019 di kabupaten Kendal*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal 2014-2019. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal yang cukup baik. Dari indikasi bagian-bagian mengenai teori pelebagaan yang dipakai. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada teori pelebagaan partai yang digunakan. Sedangkan perbedaan

penelitian dengan peneliti ajukan adalah objek penelitian yang berbeda yaitu Pelembagaan PPP di Kabupaten Semarang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelembagaan Partai persatuan pembangunan (PPP) di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.

6. Efi, Lusmianingsih, 2013. Skripsi yang berjudul *Peranan Partai Persatuan Pembangunan dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai persatuan pembangunan dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PPP aktif melakukan pendidikan politik di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada objek partai, yaitu PPP. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah fokus penelitian yang berbeda yaitu Pelembagaan PPP. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan ini dengan judul “*Pelembagaan Partai persatuan pembangunan (PPP) di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019*” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan format desain deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Ia tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam proses pengumpulan datanya ia lebih menitikberatkan pada observasi lapangan dan suasana alamiah (*naturalistic setting*), dengan mengamati gejala-gejala, mencatat, mengategorikan, dan sedapat mungkin menghindari pengaruh kehadirannya untuk menjaga keaslian gejala yang diamati.¹⁶ Penelitian kualitatif bertujuan memahami subjek penelitian secara mendalam dan bersifat interpretative, artinya menemukan makna.

Pada bagian ini, pembahasan mengenai metode penelitian akan dibagi beberapa bagian yaitu lokasi penelitian, tipe penelitian dan dasar penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data serta analisis data

1. Lokasi penelitian Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang, yang tepatnya dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.

¹⁶ Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah*; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2015) h 19.

Penulis kemudian tertarik meneliti tentang Pelembagaan PPP, ini bermula dari kenaikan suara dan kursi PPP dalam pemilu 2019 di Kabupaten Semarang yang secara langsung menunjukkan adanya pelembagaan partai yang berjalan cukup baik dari PPP Kabupaten Semarang. Pelembagaan PPP selanjutnya akan dipaparkan pada bagian pembahasan.

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif studi kasus yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian dalam hal ini mengenai pelembagaan PPP di kabupaten Semarang.

Dasar penelitian adalah menggunakan dasar penelitian fenomenologis, dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan mengenai pelembagaan PPP di Kabupaten Semarang. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.¹⁷

b) Jenis Data

¹⁷ Bruce a. Chadwick H. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, h.234

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, atau dapat pula melalui penelitian langsung melihat kondisi lingkup penelitian sebagaimana dalam penelitian ini adalah PPP Kabupaten Semarang. Untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis melakukan wawancara (komunikasi langsung) dengan para informan yaitu turun langsung ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, data-data kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang serta kegiatan dalam proses pelebagaan partainya.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, Koran dan dari situs internet yang berhubungan dengan PPP di Kabupaten Semarang, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

c) Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewee sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee.¹⁸ Penulis nantinya langsung melakukan wawancara mendalam dengan pengurus inti dari partai Persatuan Pembangunan yaitu Ketua dan Sekretaris Umum DPC Partai Persatuan Pembangunan. Adapun mengapa hal ini dilakukan karena dengan didatakannya data dari pengurus inti maka kemungkinan ketepatan data lebih besar serta permasalahan mengenai pelebagaan partai yang akan digali dalam penelitian ini akan terjawab. Mereka yang dijadikan informan dalam wawancara adalah:

- (a) Ketua Umum DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang.
- (b) Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang.
- (c) Anggota-anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang.

2) Studi Pustaka dan Dokumen

¹⁸ Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, h.58

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik ini untuk lebih menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen.¹⁹ Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung diperoleh dari pihak pertama. Data dan dokumen yang dimaksud ialah data dan dokumen yang diperoleh apakah itu dari pihak utama atau dalam hal ini pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang, atau bahkan data-data dari sumber lain yang cukup terpercaya memadai penelitian mengenai Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang.

Dalam hal ini saya mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku arsip partai berupa AD/ART PPP, Struktur kepengurusan hasil Muscab, serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian, dan hasil rekaman dengan narasumber.

3) Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif.

¹⁹ *Ibid*, h 73

Dikarenakan dalam metode kualitatif, terdapat beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi.

Adapun objek kajian penulisan ini adalah menganalisa bagaimana langkah dan upaya partai Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang dalam membentuk institusionalisasi partainya. Penelitian ini mencoba memahami dan menggali mengenai langkah PPP dalam melembagakan partainya. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini bisa terjawab dengan maksimal.

Langkah penganalisaan data ini dimulai dari penghimpunan dari data-data yang diperoleh di mana nantinya data-data kasar yang diperoleh dari informan yang dituju yaitu data-data yang diperoleh dari ketua partai dan sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang, serta dari staf sekretariat yang merupakan informan tambahan mengenai kesisteman partai apabila data yang diperoleh di tingkat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang kurang tercukupi karena kesisteman yang dimaksud disini hanyalah

kesisteman dalam tubuh DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang dalam otoritasnya.

Setelah data-data tersebut diperoleh maka akan dipilah dan dihimpun, lalu data-data tersebut akan digolongkan sesuai permasalahan penelitian, dalam hal ini apakah masuk dalam kategori upaya PPP dalam melembagakan partainya atau kendala PPP dalam melembagakan partainya di Kabupaten Semarang. Tentunya penggolongan ini menggunakan ketajaman analisis, agar pemilahan data dan penggolongan data sesuai dan tepat serta memudahkan proses penelitian atau pengolahan hasil penelitian selanjutnya.

Selanjutnya setelah data-data yang didapatkan di kelompokkan sesuai pertanyaan penelitian maka data-data yang telah terkelompokkan itu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, dalam hal ini nantinya akan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis. Dikarenakan dari data inilah akan ditarik makna apakah jawaban penelitian terjawab atau tidak, serta apakah jawaban dari pertanyaan penelitian dapat dibuktikan kevaliditas datanya, hal ini dilakukan agar dapat mudah dipahami dan akan mudah ditarik kesimpulan didalamnya atau mempermudah hingga pada ke penarikan kesimpulan Saya menggunakan langkah-langkah seperti Panduan

Penyusunan Skripsi yang dikutip oleh Dewi Sadiyah, langkah-langkah tersebut saya uraikan sebagai berikut:

(a) Memeriksa semua data yang terkumpul, baik melalui observasi, wawancara, angket, atau dokumentasi, termasuk dilakukan editing dan penyortiran terhadap data yang tidak diperlukan. Hal ini, dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

(b) Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam penelitian.

(c) Membuat kode terhadap pertanyaan yang diajukan untuk mempermudah proses pembuatan tabulasi data.

(d) Membuat tabulasi data, yakni membuat tabel-tabel dan memasukkan data ke dalam tabel-tabel tersebut sesuai dengan variabel-variabel pertanyaan dan item-itemnya.

(e) Pembahasan data (hasil penelitian) sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan, kuantitatif, atau kualitatif. Penelitian kuantitatif tentu pembahasan hasil penelitiannya dilakukan dengan menggunakan tes-tes uji statistik, dan penelitian kualitatif pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan prosedur kerja analisis kualitatif.

(f) Penafsiran terhadap hasil pembahasan data penelitian, sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah-masalah penelitian yang diajukan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemaparan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menjadi rujukan untuk memahami dan menjelaskan data atau informasi hasil penelitian dan jawaban atas masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai kerangka analisis, untuk menentukan sudut pandang masalah terhadap objek yang telah dipilih.

Untuk mengkaji lebih dalam terkait pelebagaan PPP di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019. Pertama penulis akan memberikan gambaran tentang konsep partai politik, kemudian penulis menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand.

1. **Partai Politik Islam**

Partai berasal dari bahasa latin Maurice Duveger menyebutkan “*partire*”, yang bermakna membagi (Labolo & Ilham, 2015:9). Dengan demikian dari pengertian tersebut kita bisa memaknai bahwa partai merupakan sebuah bagian maka ada bagian bagian lainnya. Partai merupakan bagian paling penting disebuah negara demokrasi. Meskipun awal dari kehadiran partai banyak yang menilai negatif. Robespierre orator agigator revolusi Perancis menyatakan partai politik hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pimpinan

Memahami politik sebagai sesuatu yang berdimensi normatif, sebagaimana juga definisi umum agama, dan bukan materialistik, politik hendaknya dimaknai sebagai upaya manusia meraih kesempurnaan/perjalanan menuju maslahatnya. Atau, dalam bahasa Aristoteles mengajarkan bagaimana bertindak tepat dan hidup bahagia. Dengan pemahaman ini, politik bernilai luhur, sakral dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Setiap manusia

yang beragama niscaya berpolitik. Oleh karena itu, berpolitik merupakan sesuatu yang inheren dengan kemanusiaan.²⁰

Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²¹

Secara teoritis pengertian Islam Politik meliputi dimensi-dimensi ajaran islam yang terkait dengan kegiatan politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami petunjuk Islam) yang telah bersinggungan dengan berbagai kepentingan manusia. Islam politik terkait dengan teori, praktik, landasan nilai islam dalam berpolitik. Kajian terhadap Islam politik merupakan upaya mempelajari perilaku seseorang, kelompok atau umat islam yang didorong kesadaran keagamaan yang tinggi.²²

Dari pokok pikiran yang berkembang dalam diskursus pemikiran politik Islam, masing-masing kelompok pemikiran Islam dapat digolongkan dalam tiga tipologi. *Pertama* kelompok yang menempatkan agama sebagai subordinasi atas negara dan memandang interrelasi agama dengan negara sebagai keharusan integralistik. Kelompok ini memandang agama sebagai institusi yang sempurna dalam mengontrol kehidupan social-politik manusia,

²⁰ Joko, Raharjo, *Skripsi Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (Studi PPP Periode 1999-2009 di Kabupaten Klaten)*, h. 15

²¹ *Ibid*, h 16

²² Abdu, Aziz, *Politik Islam Politik, Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006) h. 17

sehingga pendekatan lain tidak diperlukan lagi. Model ini dapat dijumpai jejaknya pada tokoh-tokoh pemikir Islam, semisal Almaududi, Natsir. *Kedua*, kelompok yang melihat kemungkinan adanya negosiasi terhadap aspek-aspek dari luar sepanjang tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip universalisme agama Islam. Kelompok ini toleransif dan melihat celak dilakukannya jastifikasi terhadap anasir luar, semisal demokrasi, HAM dan isu lainnya yang bisa saja dipertimbangkan. *Ketiga*, kelompok yang memandang interrelasi agama dengan negara berada dalam ruang yang terpisah atau sekuler. Dalam pandangan komunitas ini, agama tidak boleh dijadikan jastifikasi atas kehidupan politik suatu bangsa. Tentu saja argument yang dikemukakan oleh kelompok terakhir ini mempunyai segmen bahasan yang cukup kuat tentang bagaimana seharusnya sekularisme, hubungannya dengan universalisme agama atau pesan-pesan normative agama Islam yang tertuang dalam cakupan nash (Alqur'an dan Sunnah).

Peranan agama dalam masyarakat menjadi objek utama sosiologi agama. Sosiologi agama sebagai cabang sosiologi pada umumnya mempelajari agama dari pendekatan sosiologis sehingga tidak memiliki wewenang untuk membuktikan benar tidaknya suatu agama. Agama dilihat bukan dari aspek doktrin-doktrinnya yang kebenarannya bersifat mutlak, tetapi pada institusi agama, prilaku sosial para pemeluknya, dan apa yang dapat dimainkan oleh agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Pelebagaan Partai Politik

Fenomena pelebagaan partai politik menjadi kajian yang menarik dalam studi politik. Sejarah tumbuh kembang partai politik di Indonesia ditandai oleh dua hal yaitu tokoh politik dan aliran politik. Banyak partai yang hadir pada masa lalu atau masa kini dibentuk oleh tokoh politik yang memiliki *resource* yang kuat. Partai politik juga dibentuk sebagai artikulasi kepentingan politik aliran, baik itu secara keagamaan atau politik.

Studi tentang pelebagaan partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul *Political Order in Changing Societies*. Pengertian pelebagaan, menurut Samuel P. Huntington, adalah proses di mana organisasi dan tataara memperoleh nilai baku dan stabil. Nilai dan stabilitas dalam pemahaman Huntington ini mewujudkan dalam pemantapan perilaku, sikap atau budaya dalam organisasi partai politik.²³

Ramlan Surbakti memberikan pengertian pelebagaan partai politik sebagai suatu proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture*). Perilaku yang memola, sikap dan budaya, dalam pelebagaan partai politik, menurut Ramlan, beroperasi dalam empat dimensi yakni

²³ Wawan Kuswandro, *Pelebagaan Partai Politik*, 2015, wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelebagaan-partai-politik/, h. 1 di akses pada 29 Desember 2019

Dimensi Derajat Kesisteman (*Systemness*), Derajat Identitas Nilai (*Value Infusion*), Derajat Otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), Derajat Pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik. Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga apabila telah mencapai ke-empat dimensi tersebut sehingga memiliki perilaku, sikap dan budaya yang memola dan tetap.

Sementara menurut Ari Dwipayana dikutip dalam skripsi Nurlatifah, secara sederhana menyimpulkan pelembagaan partai modern adalah proses pematapan partai politik (organisasi maupun individu-individu dalam partai) dalam rangka menciptakan pemolaan perilaku atau sikap atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representative dan mampu menjalankan fungsinya.²⁴

Dari berbagai pemahaman pelembagaan partai diatas menurut Vicky Randall dan Lars Svasand yang penulis pakai nantinya adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (the process by wich the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture).

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini

²⁴ Nurlatipah Nasir, Nurlatipah, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Volume 04, No. 1 Tahun 2016

dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel empat sel, yaitu derajat kesisteman (systemnes) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. Derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. Derajat pengetahuan atau citra publik (reification) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.²⁵

Tabel 2.1

Dimensi pelembagaan partai politik versi Randall dan Svasand

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Ke-sika-pan	Identitas Nilai	Citra Publik

Sumber: Randall dan Svasand 2002

Penjelasan dari table diatas terdapat dua dimensi yaitu internal dan eksternal serta terdapat dua elemen yaitu elemen structural dan sikap/kultural (budaya). Dimensi internal menjelaskan mengenai hubungan antarbagian dalam tubuh partai, yang dimana pada bagian ini berimplikasi pada peningkatan kontinuitas dan prospek terhadap akuntabilitas pemilu. Dimensi eksternal menjelaskan bahwa partai dalam memlembagakan dirinya tidak

²⁵ Randal, dan Svasand, tentang “*Party Institutionalization in New Democracies*”, *Party Politics*, SAGE Publications, (Volume 8, No. 1, Januari, 2002) h. 12.

hanya membentuk bagian dirinya dibagian internal saja melainkan perlu membentuk hubungan diluar partai dalam hal ini hubungan antara partai dengan pemerintahan atau bahkan dengan organisasi selaras lainnya.

Elemen structural, seperti dengan dimensi eksternal merujuk pada interaksi partai dengan pemerintahan yang ada, dengan sebagai syarat dasar pelembagaan partai yang dimana partai mendapatkan otonomi dari Negara. Memang secara khusus partai politik berkegiatan dalam rangka mempengaruhi masyarakat bahkan diluar dari pendukungnya tetapi secara umum disetiap system politik idealnya partai tunduk terhadap regulasi dan konstitusi yang di buat oleh pemerintah sebagai dukungan terhadap Negara, maka disitulah cerminan partai dapat dilembagakan. Sedangkan elemen sikap nampak pada sikap masyarakat terhadap partai, terutama mengarah pada derajat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan komitmennya terhadap proses pemilu. Di lapangan, kepercayaan terhadap partai politik bisa dikatakan sebagai masalah yang dapat menghambat institusionalisasi partai.

a) Derajat Kesisteman (*Systemnes*)

Dimensi Kesisteman dalam pelembagaan partai mengarah pada proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan-aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati

dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik.²⁶ Dapat ditarik penjelasan bahwa kesisteman mengarah pada segala mekanisme yang berjalan dalam pelaksanaan fungsi partai yang sehubungan dengan aturan yang disepakati atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).²⁷

Ramlan Surbakti mendefinisikan dalam tulisannya Rowdotusya'adah. Skripsi yang berjudul *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. Kesisteman sebagai suatu proses pelaksanaan fungsi partai politik yang dijalankan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang telah diatur bersama dan dirumuskan dalam AD/ART partai politik itu sendiri.²⁸ Jadi sebuah partai politik bisa dikatakan melembaga sesuai derajat kesisteman apabila dalam pelaksanaan demokrasi internalnya ataupun pelaksanaan dalam menjalankan fungsi-fungsi partai sesuai dengan AD/ART partai politik.

Menurut Lutfi dalam tulisannya yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut

²⁶ Randal, dan Svasand, tentang “*Party Institutionalization in New Democracies*”, *Party Politics*, SAGE Publications, (Volume 8, No. 1, Januari, 2002) h. 17.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rowdotusya'adah, Skripsi yang berjudul *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. (2018) h. 27.

aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.²⁹ Menurutnya sebuah partai politik dikatakan sudah melembaga dari segi dimensi kesistemannya adalah saat partai politik melaksanakan fungsinya dan dapat menjaga keutuhan organisasinya dalam penyelesaian konflik menurut aturan yang telah disepakati bersama, yaitu AD/ART.

Menurut Randall dan Svanson derajat kesisteman ini dapat diukur dari: pertama, asal usul partai politik (*origins*). Kedua, sumberdaya (*Resource*) atau disebut juga keuangan atau pendanaan. Ketiga kepemimpinan (*leadership*), lebih melihat siapa yang lebih menentukan didalam partai. Keempat faksionalisme menyoroti siapa aktor yang membentuk atau menentukan faksi-faksi. Terakhir implikasi klientalisme menyelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, apakah klientisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau berdasarkan aturan main dalam konstitusi partai.³⁰

Pernyataan Randall dan Svanson ini menurut penulis sebuah partai dikatakan melembaga sesuai derajat

²⁹ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*.h. 7

³⁰ Randal, dan Svanson, tentang “*Party Institutionalization in New Democracies*”, *Party Politics*, SAGE Publications, (Volume 8, No. 1, Januari, 2002) h. 17.

kesistemannya selain bagaimana partai politik mengelola demokrasi internalnya, dan menjaga keutuhan organisasinya, rekrutmen anggota dan pengurus yang sesuai prosedurnya juga merupakan salah satu indikator partai itu sudah memenuhi derajat kesistemannya apa belum. Selain itu juga peran tokoh atau aktor yang membentuk atau menentukan faksi-faksi juga bisa dijadikan salah satu indikator derajat kesisteman suatu partai politik.

b) Derajat Identitas Nilai

Setiap partai politik dibentuk mendasarkan diri pada nilai atau ideologi yang hendak diusungnya. Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai. Untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Selain itu, ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik. Ia seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik.³¹

Sedangkan identitas nilai berhubungan erat dengan orientasi kebijakan partai menurut ideologi yang dianutnya. Menurut Ramlan Surbakti dalam tulisannya Rowdotusya'adah Identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi atau

³¹ Lili Romli, *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian* vol. 2 no. 2 november 2011 h. 203

platform partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai.³² Dari sisi tersebut, partai politik dikatakan melembaga apabila telah memiliki basis pemilih atau kelompok masyarakat yang loyal mendukung partai bersangkutan atas dasar *platform* atau ideologi partai.

Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran. *Pertama*, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. *Kedua*, platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan *benchmark* normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, *platform* merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari.³³

Sebuah identitas nilai tampak bukan pada pola atau arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada

³² Rowdotusya'adah, Skripsi yang berjudul *Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. (2018) h. 29.

³³ Lili Romli, *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian* vol. 2 no. 2 November 2011 h. 205

basis sosial pendukungnya. Partai dalam memperjuangkan kebijakannya tidak hanya mengandalkan kekuatan dari diri sendiri. Partai juga memanfaatkan organisasi-organisasi sayap atau organisasi afiliasi. Partai politik itulah yang menjadi tulang punggung untuk merangsang pengembangan organisasi-organisasi lainnya.³⁴

Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik menurut Hijriyah Y dalam skripsinya, berkaitan dengan hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu. Kemudian pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.³⁵

³⁴ Randal, dan Svasand, tentang “Party Institutionalization in New Democracies”, *Party Politics*, SAGE Publications, (Volume 8, No. 1, Januari, 2002) h. 21.

³⁵ Hijriyah Y, Skripsi yang berjudul *Institusionalisasi Partai Nasdem di Kabupaten Gowa*, (2013). h. 23.

Rowdotusya'adah juga menyimpulkan dalam skripsinya, partai politik dapat dikatakan terlembaga dalam dimensi identitas nilai apabila partai tersebut telah memiliki pendukung loyal yang berasal dari golongan masyarakat tertentu. Dukungan itu harus diberikan karena ideology atau platform partai sama dengan kebijakan atau kepentingan yang diperjuangkan oleh kelompok tersebut, bukan karena transaksi yang bersifat material.³⁶

Selain hubungan partai dengan kelompok populis tertentu atau basis dukungan, partai politik juga memiliki pengaruh klientelisme dalam organisasi. Pengaruh klientelisme dalam organisasi yaitu apakah hubungan partai dengan anggotanya bersifat instrumental atau lebih bersifat ideologis.³⁷

Dari pernyataan diatas, jadi sebuah partai dapat dikatakan sudah melembaga menurut derajat identitas nilainya jika partai politik memiliki hubungan dengan kelompok populis tertentu atau basis dukungan, partai politik juga memiliki pengaruh klientelisme dalam organisasi.

c) Derajat Otonomi

³⁶ Rowdotusya'adah, Skripsi yang berjudul *Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. (2018) h. 30.

³⁷ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 8

Tentang derajat otonomi menurut Wawan Kuswandoro dalam Artikelnya suatu partai politik dalam pembuatan keputusan, yang disebutkannya berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).³⁸

Derajat otonomi suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran. Bagaimana hubungan suatu partai politik dengan pengusaha penyandang dana: siapa menentukan siapa? Jawaban atas pertanyaan ini amat tergantung pada siapa yang menjadi penyandang dana. Bila dana diperoleh dari Negara (APBN ataupun APBD) secara resmi.³⁹

Menurut Randall dan Svansand derajat otonomi keputusan partai mengacu pada ketergantungan partai terhadap actor eksternal. Ketergantungan partai terhadap pihak luar dapat menyebabkan pelembagaan partai menjadi lemah karena sumber

³⁸ Wawan Kuswandoro, *Pelembagaan Partai Politik*, 2015, wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/, h. 1 di akses pada 29 Desember 2019

³⁹ Makmun, Wahid, *Upaya Pelembagaan Partai Politik Melalui Pilkada Serentak 2018: Sebagai Upaya Melahirkan Elit Politik Yang Etnis*. (2018) h. 20.

legitimasi pimpinan dan obyek loyalitas berada di luar partai.⁴⁰ Sementara itu, derajat otonomi lebih menekankan aspek relasi antara partai dengan aktor di luar partai, baik sumber otoritas seperti penguasa maupun pemerintah, atau sumber dana semisal pengusaha, penguasa, negara, atau lembaga luar lainnya serta sumber dukungan massa, contohnya organisasi masyarakat.⁴¹

Idealnya, partai politik disebut melembaga apabila semua keputusan politik yang dibuat partai terbebas dari intervensi pihak luar. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada sumber pendanaan partai politik. Rumusan ini sejalan dengan *framing* yang diberikan Huntington tentang otonomi partai sebagai salah satu kriteria pelembagaan.

Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran. Karena itu, otonomi sebuah partai akan semakin kuat jika biaya hidup parpol berasal dari mekanisme pendanaan internal partai itu sendiri.

Letak kendala parpol saat ini adalah untuk mendapatkan dukungan keuangan dari anggota misalnya, partai politik sudah mulai kesulitan. Seiring dengan mahalnya biaya operasional partai, terutama menjelang pilkada, tidak sedikit partai yang

⁴⁰ Randall dan Svasand, tentang “*Party Institutionalization in New Democracies*”, *Party Politics*, SAGE Publications, Volume 8, No. 1, Januari, (2002). h. 22.

⁴¹ Ramlan, Surbakti “*Tingkat Pelembagaan Partai Politik*”, *Kompas*, 6 Januari 2003 di akses pada 29 Desember 2019

kemudian mengandalkan sumbangan perorangan maupun perusahaan dalam jumlah terbatas. Celakanya, partai politik sekarang ini justru semakin tergantung dengan pihak-pihak luar sebagai penyokong dana partai. Dalam konteks sumber dana politik, fakta menunjukkan bahwa hampir semua partai politik di banyak negara saat ini didominasi oleh perorangan dan perusahaan.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas suatu partai politik dapat dikatakan melembaga menurut derajat otonomi jika suatu partai memiliki otonomi bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran. Kemudian dalam pembuatan keputusan tidak ada campur tangan pihak lain dan sepenuhnya engacu pada AD/ART yang telah disepakati bersama.

d) Derajat Pengetahuan Publik

Adapun derajat pengetahuan (reification) terkait dengan seberapa jauh partai mampu memberikan citra ke publik menurut pandangan masyarakat yang dapat mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam meberikan dukungannya.⁴³ Dengan kata lain, pengetahuan yang melekat dalam benak masyarakat terhadap suatu partai tidak lepas dari kinerja yang dihasilkan partai tersebut berdasarkan ideologi yang diyakininya.

⁴² Randall dan Svasand, tentang “*Party Institutionalization in New Democracies*”, *Party Politics*, SAGE Publications, Volume 8, No. 1, Januari, 2002

⁴³ *Ibid.*

Biasanya, masyarakat bisa mengidentifikasi dan menyusun informasi terkait suatu partai ketika partai harus melakukan tindakan tertentu dan mengapa partai memilih untuk tidak melakukan tindakan lainnya. Dengan demikian, peluang masyarakat untuk menyesuaikan harapannya terhadap suatu partai tidak lepas dari imajinasi yang telah tertanam dalam benak publik itu sendiri. Masalahnya, saat ini partai politik di Indonesia dihadapkan pada krisis imajinasi terhadap parpol.⁴⁴ Sehingga aspek-aspek pelembagaan seperti yang diuraikan di atas kini menjadi kebutuhan mendesak. Hal itulah yang nantinya akan dijadikan bagaimana strategi partai politik untuk membangun citra public sebagai pendulang suara.

Berdasarkan uraian diatas suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai partai tersebut, sehingga masyarakat mudah untuk memahaminya.

Penjelasan di atas telah dipaparkan berbagai dimensi yang akan digunakan dalam melihat bagaimana proses Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Semarang atau bagaimana partai politik dilembagakan. Dimana di dalam setiap dimensi atau aspek terdapat batasan - batasan sehingga kita nantinya dapat mudah menelaah partai yang akan

⁴⁴ Sigit, Pamungkas, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: *Institute for Democracy and Welfarism*

menjadi obyek penelitian. Dari segi pelaksanaan pelebagaan partai terletak dari profesionalisme dan pengelolaan partai. Bukan hanya partai akan terlihat pada saat menjelang pemilu, tetapi juga rutinitas yang dilakukan partai sehari-hari. Pengelolaan partai dalam hal ini menyangkut ideologi dan kebijakan, aturan main, kekuasaan dan latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinnya, rekrutmen dan kandidat yang duduk dilegislatif, serta proses marketing politik dari partai tersebut.

Pemaparan dalam konsep pelebagaan menampilkan beberapa argument dari para aktor konsep pelebagaan partai, tapi dalam kelanjutan penelitian dan pembahasan akan lebih cenderung menggunakan pelebagaan partai menurut Vicky Randall dan Lars Svasan, adapun pemahaman-pemahaman yang lainnya juga digunakan dalam membantu memperdalam analisis pembahasan kelak.

BAB III

GAMBARAN OBYEK DAN DATA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum penelitian mengenai Partai Persatuan Pembangunan dan tempat lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Semarang.

A. PPP Sebagai Partai Islam

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam.⁴⁵

1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

PPP didirikan oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratör itu adalah;

- KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
- H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan

⁴⁵ Zuly, Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). h. 227

- Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.⁴⁶

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.

Pada Mukhtamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Mukhtamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Mukhtamar VII Bandung 2011 bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala.

⁴⁶ <https://www.satukanindonesia.com/2018/partai-persatuan-pembangunan-ppp/> di akses pada 18 April 2020, pukul 12.51 WIB

PPP merupakan partai politik penerus estafet partai islam wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa T'ala melalui perjuangan politik. PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Makna Lambang

Berdasarkan anggaran rumah tangga PPP hasil Mukdamar VIII Bab I pasal I mengenai simbol partai,

Gambar 3.1
Logo Partai persatuan Pembangunan



- a) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam.
- b) Ka'bah bagi Partai Persatuan Pembangunan merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subahanu wa Ta'ala serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.
- c) Lambang Partai Persatuan Pembangunan adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar Aswad tepat pada sudut dinding, dibawah gambar ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan diatas warna dasar hijau dalam bingkai segi empat sama sisi berwarna kuning emas.⁴⁷

⁴⁷ AD ART Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016

3. Platform Partai

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa T'a'ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (syariat) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil „alamiin).⁴⁸

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama'ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sertasalaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlus sunnah wal jama'ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga

⁴⁸ Joko, Raharjo, *Skripsi Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (Studi PPP Periode 1999-2009 di Kabupaten Klaten)*, h. 44

keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil ‘alamiin). Paham keagamaan ahlussunnah wal jama‘ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (tatharruf), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.⁴⁹

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan Partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar sebuah tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (ideological party apparatus) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) Partai, yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai Partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

⁴⁹ AD ART Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, 2016

4. Asas, Sifat, dan Prinsip Perjuangan PPP

Dalam penjelasan AD/ART PPP Bab II tentang Asas, Sifat, dan Prinsip Perjuangan PPP, yaitu:

Pasal 2 PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan Ahlussunnah WalJama'ah.

Pasal 3 PPP bersifat nasional.

Pasal 4 Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a) Prinsip ibadah
 - b) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar
 - c) Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan
 - d) Prinsip musyawarah
 - e) Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan
 - f) Prinsip istiqamah.⁵⁰
- #### 5. Visi dan misi

a) Visi PPP

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada AllahSWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggiharkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yangberlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada

⁵⁰ Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan pembangunan 2016,

aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah.

b) Misi PPP

- 1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham atheisme, komunisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memerhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
- 3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan

dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

- 4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
- 5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *Baladatul Thayyibatun Warabbun Ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.⁵¹

c) Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

Dalam penjelasan AD/ART PPP pasal 15 tentang Struktur Organisasi Kepemimpinan PPP, yaitu:

- 1) Organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP

⁵¹ Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan pembangunan 2016,

- 2) Organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP
- 3) Organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP
- 4) Organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PAC PPP
- 5) Organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR PPP
- 6) Organisasi ditingkat negara atau gabungan negara di luar Indonesia berkedudukan di wilayah negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPLN PPP.⁵²

6. Program Kerja PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi

⁵² Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan pembangunan 2016,

harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan

BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan,

kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

B. PPP Kabupaten Semarang

PPP di Kabupaten Semarang layaknya PPP di daerah lainnya yang juga memiliki kantor DPC dan juga ranting. Sekaligus yang telah dibahas sekilas diatas bahwasanya jawa tengah khususnya Kabupaten Semarang secara tidak langsung merupakan lumbung suara bagi PPP, sebab memang PPP partai yang berasaskan islam dengan mayoritas NU. Hal ini sesuai dengan kabupaten semarang yang juga merupakan basis dari NU. Dalam PPP kabupaten semarang khususnya di DPC, struktur kepengurusan dikuasai oleh kubu dari Romahurmuzi selaku ketua umum DPPP periode 2015-2019 hasil dari muktamar Surabaya. Bahkan hingga status PPP yang mulai mutakhir yakni hasil PT TUN dimenangkan oleh PPP kubu Romi.

1. Struktur Kepengurusan Partai

Table 3.1
Susunan Dan Personalia
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang
Masa Bakti 2016 - 2021

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Nurul Huda
2	Wakil Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Merumuskan Program	Roihamdi
3	Wakil Ketua Bidang Agama Dan Da'wah	Kh. Mujib
4	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan Dan Kaderisasi	Junaidi Ahmad Tsani
5	Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum Dan Ham	Syarifudin
6	Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf Dan Baksos	H. Fatkhurahman
7	Wakil Ketua Bidang Pemuda	Hanif Fuadi, SP.

- Dan Olah Raga
- 8 Wakil Ketua Bidang Ahmad
Pemenangan Pemilu Afifudin,S.Ag
- 9 Wakil Ketua Bidang Nur Hamid, SE
Pendidikan Dan Kebudayaan
- 10 Wakil Ketua Bidang Tri Pranoto
Teknologi Dan Informasi
- 11 Wakil Ketua Bidang Siti Masamah, SH
Pemberdayaan Perempuan
Pelindungan Anak
- 12 Wakil Ketua Bidang Isna Ahmad
Pengembangan Koperasi Dan Juhardani, S. Ip
Kewirausahaan
- 13 Wakil Ketua Bidang Sodrudin Ahmad
Komunikasi Dan Hubungan Ghozali
Media
- 14 Wakil Ketua Bidang dr. Evaliana Putri
Kesehatan Dan Social
- Kemasyarakatan
- 15 Sekretaris Muhyidin Spd. I**
- 16 Wakil Sekretaris Bidang Drs. Slamet
Penelitian, Pengembangan Widodo
Dan Merumuskan Program
- 17 Wakil Sekretaris Bidang Ny. Nichrotun
Agama Dan Da'wah

- 18 Wakil Sekretaris Bidang Mochlasin
Organisasi, Keanggotaan Dan
Kaderisasi
- 19 Wakil Sekretaris Bidang Robin Komarudin.
Advokasi Hukum Dan Ham SH.I
- 20 Wakil Sekretaris Bidang Isti Masunah
Pengelolaan Zakat Infaq
Shodaqoh Wakaf Dan Baksos
- 21 Wakil Sekretaris Bidang Munawar
Pemuda Dan Olah Raga
- 22 Wakil Sekretaris Bidang Muh Irfa'i Ghozali
Pemenangan Pemilu
- 23 Wakil Sekretaris Bidang Ny. Nurul Inayati,
Pendidikan Dan Kebudayaan S.Pd.
- 24 Wakil Sekretaris Bidang Priyo Sunarto
Teknologi Dan Informasi
- 25 Wakil Sekretaris Bidang Nur Hasanah,
Pemberdayaan Perempuan S.Pd.I
Pelindungan Anak
- 26 Wakil Sekretaris Bidang Fita Sri Wulandari
Pengembangan Koperasi Dan
Kewirausahaan
- 27 Wakil Sekretaris Bidang H. Tarmuji Ikhsan
Komunikasi Dan Hubungan
Media

28	Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan Dan Social Kemasyarakatan	Ernawati
29	Bendahara	Zaenudin Effendi
30	Wakil Bendahara	Umi Muthoharoh, SE
31	Wakil Bendahara	Ni'matul Khomsiyah, S.Pd.I

2. Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

Dalam penjelasan AD/ART PPP pasal 36 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, yaitu:

- a) Tugas Pengurus Harian DPC adalah:
- 1) Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat kabupaten/kotasesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP dan Pengurus Harian DPW.
 - 2) Menetapkan Personalia Anggota Majelis Syari'ah DPC, Anggota Majelis Pertimbangan DPC, dan Anggota Majelis Pakar DPC dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.

- 3) Membentuk dan mengoordinasikan Bagian Bagian/Lembaga-Lembaga
 - 4) Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) periode.
- b) Wewenang Pengurus Harian DPC adalah:
- 1) Mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat cabang/kabupaten/kota dengan persetujuan Pengurus Harian DPW.
 - 2) Mengusulkan perubahan personalia Pengurus Harian DPC kepada DPW PPP untuk mendapatkan pengesahan dan melaporkan secara tertulis kepada DPP.
 - 3) Mengusulkan kepada Pengurus Harian DPP dengan rekomendasi DPW tentang pencalonan pejabat publik ditingkat kabupaten/kota yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP.
 - 4) Mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Anak Cabang tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian PAC serta Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC, dengan melaporkan secara tertulis kepada DPW.
 - 5) Menetapkan Susunan/Personalia Pimpinan Fraksi PPP DPRD Kabupaten/Kota dengan memerhatikan aspirasi Anggota Fraksi.

- 6) Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota dengan memerhatikan aspirasi Anggota Fraksi.
- 7) Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang LuarBiasa dalam hal Pengurus Harian DPC menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian PAC dengan persetujuan Pengurus Harian DPW.
- 8) Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota, Musyawarah Anak Cabang, Pengurus Harian PAC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPC dan Majelis Pertimbangan DPC sesuai dengan keputusannya.
- 9) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁵³

C. Dinamika Politik Kabupaten Semarang

Bicara mengenai dinamika politik Kabupaten Semarang dalam pemilu 2014 – 2019 sangat lika-liku dan penuh kejutan. Bertambahnya peserta partai politik dalam pemilu 2019 setidaknya membuat partai lama harus benar-benar mengatur dan

⁵³ Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan pembangunan 2016,

mempersiapkan strategi dengan sungguh-sungguh. Partai politik pendatang baru itu adalah (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, (PPI) Partai Persatuan Indonesia, dan (PGPI) Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

Kedatangan 4 Partai politik peserta baru dalam pemilu 2019 di Kabupaten Semarang tentunya akan menjadi dinamika pada perolehan suara. Karena seperti halnya PSI yang terkenal sebagai Partainya anak muda ini tanpaknya akan menjadi kuda hitam dalam pemilu 2019 nantinya. Selain itu Partai Berkarya, Partai anaknya mantan Presiden RI ke 2 ini juga tak kalah eksisnya dengan partai lainnya. Ini juga bisa menjadi kuda hitam dalam pemilu 2019 di Kabupaten Semarang nanti, karena partai ini adalah sebagian dari orang-orang yang pernah dala partai Golkar.

Kedatangan partai baru nampaknya menjadi hal yang serius bagi partai-partai lama, walaupun mereka yakin sudah mempunyai basis pendukung asing-masing ditiap daerah. Tetapi yang namanya dinamika sangat sulit ditebak, apalagi sekarang banyaknya kasus korupsi yang menjerat orang-orang partai ternama bisa jadi akan menjadi kekecewaan bagi masyarakat dan bisa jadi akan memilih partai baru.

Table 3.2

Rekapitulasi pemilu 2014 Kabupaten Semarang

No	Partai	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Total
		1	2	3	4	5	suara

1	PDIP	23.026	20.722	11.822	40.670	33.766	89.336
2	PKB	13008	9480	19154	10800	13404	65.846
3	GOLKAR	10.659	11.195	7.217	11.713	17.671	58.455
4	GERINDRA	12.404	10.745	11.917	9.270	12.817	
5	PAN	13141	5698	11642	5591	16236	52.308
6	PKS	8738	8914	10526	16914	5695	50.787
7	PPP	9.313	7.559	11.607	4.640	15.881	49.000
8	HANURA	6293	10126	7545	9911	10233	44.108
9	DEMOKRAT	11.596	11603	5908	6407	6708	42.222
10	NASDEM	6231	4466	3783	2515	4043	21.038
11	PKPI	938	130	430	77	148	1.723
12	PBB	295	179	278	196	302	1.250

Sumber; KPU Kabupaten Semarang

Table 3.3

Rekapitulasi pemilu 2019 Kabupaten Semarang

No	Partai	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Total suara
		1	2	3	4	5	
1	PDIP	38.779	44.672	23.296	51.365	35812	193.942
2	PPP	13.763	10.211	21.525	5.995	15.527	67.021
3	PKB	15.424	18.388	14.813	7.373	9173	65.171
4	PKS	12.986	10.138	9.287	14.803	6302	53.516

5	GOLKAR	4.765	9.056	8.773	14.035	13656	50.285
6	GERINDRA	9.939	15.126	7.200	5.314	9447	47.026
7	NASDEM	8.384	7.368	4.792	4.535	12450	37.529
8	PAN	8.282	4.755	5.495	8.006	7955	34.493
9	DEMOKRAT	11.692	7.087	4.948	4.953	2377	31.057
10	HANURA	270	6.491	3.761	6.333	4426	21.281
11	PARTAI BERKARYA	1.304	772	1.323	1.044	710	5.153
12	PPI	5.457	2.430	4.520	2.333	3827	18.567
13	PSI	1.036	700	171	220	321	2.448
14	PGPI	343	156	173	141	143	956
15	PBB	295	91	122	111	103	722
16	PKPI	111	56	48	63	49	327

Sumber; KPU Kabupaten Semarang

PDIP dan PPP mengalami kenaikan suara yang signifikan dari periode sebelumnya, PDI Perjuangan secara mengejutkan mampu mendapatkan suara yang spektakuler dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya.

Melampaui jauh diatas parpol yang mendapatkan suara peringkat kedua dibawahnya. PDI Perjuangan memperoleh jumlah total sebanyak 193.924 suara dengan perolehan suara hampir merata di semua dapil.

Kejutan lain juga terlihat dari perolehan suara PPP yang pada pemilu tahun ini memperoleh suara jauh melebihi pemilu tahun 2014 lalu. Walaupun terpaut dengan PDI Perjuangan yang berada di

peringkat pertama, ini juga merupakan suatu hal yang baik dalam dinamika politik PPP di Kabupaten Semarang Sendiri karena dari peringkat tujuh ditahun 2014 menjadi peringkat dua di tahun 2019. PPP memperoleh jumlah total 67.021 suara di tahun 2019 yang dulunya di pemilu 2014 hanya mendapatkan 39.690 suara, “Artinya, perolehan suara untuk PPP di Kabupaten Semarang itu tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK,”

Peringkat ketiga, diperoleh PKB dengan jumlah total 65.171 suara. Ini adalah penurunan bagi PKB yang sebelumnya diperingkat kedua dengan total perolehan suara 65.846, walaupun tidak terlalu signifikan penurunan suara dari PKB ini, tetap saja ini adalah sebuah peringatan tersendiri untuk partai ini.

Peringkat empat, didapat PKS dengan jumlah total 53.513 suara. Untuk partai Keadilan Sejahtera ini merupakan hasil yang membaik dari pemilu sebelumnya, berdasarkan tabel diatas PKS meraih kenaikan suara, walaupun tidak se signifikan partai PDIP maupun PPP.

Peringkat kelima adalah partai Golkar yang pada pemilu 2019 ini mendapat jumlah total suara sebanyak 50.285 suara. Partai Golkar mengalami penurunan suara yang cukup signifikan dari pada pemilu 2014 sebelumnya yang berada diperingkat tiga dengan total memperoleh suara sebanyak 58.455

Kemudian, perolehan kursi yang luar biasa adalah untuk PPP. Yang pada pemilu periode sebelumnya hanya tiga kursi, dalam pemilu kali ini naik dua kali lipat menjadi enam kursi.

“Perolehan suara untuk PPP di Kabupaten Semarang itu tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK atau dua lisme partai yang menerpa pusat, hasil ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat tidak terpengaruh tentang isu yang sedang melanda pusat, di daerah lain juga seperti itu yang saya ketahui sekarang.”⁵⁴

Demikian halnya dengan prediksi perolehan kursi untuk Partai Gerindra yang mestinya terkena efek kekuatan besar Pemilu Presiden karena partai politik ini Ketua Umumnya, yakni Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Tetapi hal itu tidak terjadi, dan partai berlambang kepala burung garuda ini di Bumi Serasi diprediksi hanya mendapat empat kursi DPRD Kabupaten berdasarkan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten kemarin.

Dari hasil perolehan suara dalam kurun waktu Antara 2014 sampai 2019, dapat dikatakan bahwa partai-partai berbasis Islam kurang menjadi idola dikalangan pemilih di Kabupaten Semarang. Melihat 2014 dan 2019 masih dimenangkan oleh partai PDIP yang notabnya adalah partai nasionalis, dan bisa kita lihat juga perbandingan signifikan antara PDIP dan peringkat kedua PPP, walaupun peringkat tiga dan keempat di tempati oleh partai PKB

⁵⁴ Tri Pranoto (Wakil Ketua Bidang Teknologi Dan Informasi DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Kantor Fraksi PPP, 5 Maret 2020, pukul 13.30 WIB

dan Partai PKS, namun melihat total perolehan suara PDIP hamper sama dengan jumlah ketiga partai dibawahnya jika di jumlahkan.

D. Dinamika PPP

1. Dinamika PPP Nasional

Pemilu pertama di masa Orde Baru (1971) mengantarkan terbentuknya format politik baru yang dikenal sebagai *'hegemonic party system'* dengan Golkar (ABRI) sebagai pilarnya. Kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu tersebut memberi legitimasi pemerintah orde baru untuk melakukan restrukturisasi sistem politik nasional. Restrukturisasi ini yang melahirkan partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai dari fusi empat partai islam, yakni Partai NU (Nahdhatul Ulama), Parusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Serikat Islam Indonesia), dan Perti (Persatua Tarbyah Islam)⁵⁵

Pada periode awal partai (1973-1985), karakter federative PPP seperti diatas ternyata melahirkan medan baru bagi pertarungan internal dari faksi-faksi yang membentuknya. Nasab PPP yang blesteran secara kontinyu menghasilkan pertarungan internal, yang dalam jangka panjang melahirkan terjadinya krisis identitas partai. Sementara asas agama yang dianut PPP dianggap berseberangan dengan mainstream politik

⁵⁵ Abdu, Aziz, *Politik Islam Politik, Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogjakarta, Tiara Wacana, 2006) h. 3

Orde Baru, Sehingga menyebabkan PPP tetap dalam posisi marginal.

Sekalipun demikian, meski ditengah marginalisasi politik Orde Baru, PPP tetap berusaha konsisten untuk memperjuangkan *platform* fundamental politiknya. Elatarbelakang elit dan edeologis yang ada didalamnya ikut menentukan politik PPP dalam melawan penetrasi dan intervensi direzim waktu itu. Kasus-kasus voting, *walk out*, serta sikap keras partai ini sering menjadi pilihan terakhir saat kepentingan islam terancam. Sikap ideologis ini terefleksi dalam pertarungan ditingkat parlemen.

Pada periode berikutnya, yakni periode kedua pejalanan partai (1985-1998), terjadi perubahan mendasar yang enyangkut basis ideologi PPP. Untuk yang kedua kalinya rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi politik, yakni melalui UU No. 5 tahun 1985. UU ini mengharuskan semua organisasi kemsyarakatan (ormas) dan partai politi (parpol), termasuk PPP ‘dipaksa’ untuk melepaskan ‘asas Islam’ dan lambing Ka’bah’ yang enjadi symbol dan kebanggaan utamanya. Mulai saat ini PPP mulai mengalami disorientasi ideologis, pasalnya artikulasi politik Islam yang melambangkan identitas politiknya semakin kabur.

Era reformasi memberi wacana baru sekaligus babak baru dalam sejarah politik PPP. Dalam Muktamar ke-4, PPP membahas ulang identitasnya. Dalam Muktamar tersebut, *mainstream* pendapat didalam tubuh PPP menghendaki

kembalinya 'Islam' bukan hanya sebagai identitas partai naun juga asas partai. Setelah memperjuangkan dicabutnya Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dalam Sidang Istimewa (SI) MPR 1998, PPP langsung merevitalisasi ideology partainya, menjadi berasas 'Islam' dan berlambang Ka'bah'.⁵⁶

Pergantian lambang dan asas partai menjadi lembaran sejarah baru bagi PPP. Kembalinya PPP ke asas Islam merupakan kembalinya PPP kepada *khittoh* 1973. Pergantian asas PPP ini juga menandai fase baru dalam pergeseran dan dinamika internal yang bersifat ideologis. Di satu sisi, dinamika itu menunjukkan kebangkitan romantisme sejarah perjuangan ideology PPP, yang semula dihancurkan oleh rezim Orde Baru melalui 'deideologisasi politik'. Di sisi lain, sebagaimana dikatakan Syamsudin Haris, kembalinya PPP ke *khittoh* diharapkan dapat memperbaiki kembalinya citra politik PPP sebagai partai yang kritis terhadap pemerintah.⁵⁷

Belum berakhir kemudian public disugui dinamika internal PPP yang terpapar sangat jelas diruang public melalui media social dan media elektronik serta cetak, dimana terpecahnya kondisi internal PPP kedalam dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang lengkap dibumbui isu pembelotan, penggulingan, dan perebutan kekuasaan di internal partai. Fenomena ini kemudian terbawa hingga akhir penyelenggaraan

⁵⁶ *Ibid*, h 5

⁵⁷ *Ibid*, h 6

pemilu presiden dan saat berjalannya koalisi yang terbentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan di pemerintahan.

Komentar miring dan sinis kemudian lebih banyak dilabelkan pada PPP apalagi ketika kebijakan politiknya memutuskan untuk melakukan manuver dengan berpindah dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat karena kepentingan mengejar jatah kursi kekuasaan, dan saat ini dengan diputuskannya secara tetap untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla dimana di koalisi terakhir ini PPP mendapatkan jatah satu kursi di kementerian. Berbagai kalangan berpendapat, PPP telah melakukan tindakan inkonsistensi yang melukai konstituennya pada pemilihan umum sebelumnya, lebih daripada itu PPP ternyata hanya mementingkan kepentingan ambisi kekuasaan semata.

Apalagi dengan adanya perseteruan dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang memuncak dan juga saling tanding kekuasaan melalui dua muktamar yang di gelar, dan saat ini satu muktamar telah berhasil mengangkat Rhomahurmuzy sebagai ketua umum PPP. Suara public kemudian lebih banyak yang tertuju untuk menghabisi integritas PPP sebagai partai politik yang di satu sisi punya amanat untuk menyuarakan suara rakyat dan membawanya ke proses politik pemerintahan.

Namun demikian PPP adalah bagian dari dinamika ke-Indonesiaan kita. Apa yang terjadi pada PPP, sepatutnya masyarakat Indonesia kader ataupun bukan kader, simpatisan

ataupun bukan, tidak dapat menutup mata dengan dinamika yang terjadi pada PPP. Pun juga tak sepatutnya memberikan saran untuk menyingkirkan jejak rekam PPP dalam dunia politik KeIndonesiaan kita. Lebih ekstrim lagi adalah menilai PPP tidak lagi dapat mencerminkan keIslaman dalam arti sempit dan simbolis.

Kita telusuri secara historis bagaimana PPP terbentuk dan mempunyai jejak rekam dalam politik keIndonesiaan kita. Secara historis PPP adalah partai politik yang merupakan produk fusi orde baru pada masanya dari berbagai organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di tanah air, dan memiliki ciri gerakan sipil keagamaan di masyarakat yang begitu progresif. Sebut saja misalnya didalamnya kita menemukan Nahdatul Ulama sebagai bagian terbesar civil religion di Indonesia, kemudian PERMUSI, SI, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Organisasi Islam ini merupakan ciri dari adanya dinamika umat Islam di tanah air yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan umat. Dan mereka pun bukan organisasi keagamaan semata yang berbasiskan kepentingan golongan. Mereka turut hadir menyeruak batas kesadaran umat terhadap kondisi panjang yang di alami Indonesia, untuk merdeka dari penjajahan, untuk kesejahteraan umat, untuk pendidikan yang lebih baik, untuk melawan ketertindasan, untuk menegakkan nilai kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan umat Islamnya yang terbesar di dunia. Tidak mudah memang menyandang gelar sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Meskipun label negative selalu dicirikan kepada umat Islam, tetapi pernahkah kita memahami bahwa justru umat Islam adalah umat yang paling dinamis di muka bumi dengan segala permasalahan kemasyarakatannya. Umat agama lain mungkin tidak akan sanggup menampung dinamika sebesar dinamika pergerakan umat Islam, hingga kepada label negative yang dilekatkannya seperti terorisme, miskin, konservatif, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya ujung kesadaran kemanusiaan masyarakat justru tergugah pertama kali oleh karena keberadaan umat Islam, pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia contohnya dimana kesadaran kemerdekaan didapat secara progresif dari umat Islam.

Jika hal ini kita kembalikan kepada fenomena PPP dan dinamikanya, kita dapat melihat bahwa PPP setidaknya masih merupakan cermin dari dinamika umat Islam di negeri ini apakah mereka bukan kader, bukan partisipan sekalipun. Dinamika PPP internal ataupun eksternal adalah cermin bagi umat Islam terhadap kondisi kekinian umat. Sekaligus rantai konsekuensi kiprah politik umat di gelanggang politik arena kekuasaan.

Secara naïf PPP adalah cermin dinamika umat yang berhadapan dengan kondisi kekinian, dimana kondisi global,

liberalisme, kapitalisme mengakar. Umat Islam berhadapan dengan kondisi itu dari berbagai bidang, terutama politik sedang menggeliat mencari ruang yang telah semakin sempit tanpa adanya kepastian identitas dalam kehidupan social bersama khususnya di ruang Negara. Salah satu kegelisahannya di wujudkan dalam gerakan politik kekuasaan. Selain daripada itu, kondisi internal PPP juga cermin, bahwa generasi muda Islam sedang bertumbuh mencari tempat disempitnya ruang, dan terpaksa harus bersinggungan dengan generasi tua, dan kaum kepentingan yang terus mendesak menghabisi integritas kemasyarakatan.

Tidak ada pilihan partai politik selain orientasi kekuasaan, demikian juga dengan PPP dengan segala manuver politiknya, karena sewajarnya demikian lembaga politik berbuat. Bagaimana PPP mengejar kekuasaan, mendapatkannya, menjaganya, dan menyampaikan konsepsi kekuasaan itu kepada masyarakat, adalah perilaku biasa sebagaimana partai politik lain berbuat. Namun karena PPP adalah isi dari sebagian identitas progresif umat Islam yang selalu menuntut dinamika perubahan dan tidak tahan terhadap stagnasi, maka kemudian PPP menjadi sorotan terbesar masyarakat yang lalu dikaitkan dengan soal keagamaan, padahal soal agama adalah juga soal kemanusiaan dan dinamikanya yang tidak harus kita lupa.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diguncang prahara serius jelang pemilu. Sang ketua umum,

Romahurmuziy (Romi) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya, Jumat pekan lalu. Romi disebut terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama yang dipimpin oleh Kader PPP Lukman Hakim Saifuddin. Padahal, Pemilu serentak 2019 tinggal satu bulan lagi. Kejadian ketua umum terbelit kasus korupsi di KPK bukan kali ini saja. Jelang Pemilu 2014 lalu, sang ketua umum yang saat itu dijabat Suryadharma Ali, juga harus berurusan dengan lembaga antirasuah. Romi telah resmi dipecat oleh DPP PPP. Untuk jabatan ketua umum sementara dipimpin Suharso Monoarfa sebagai pelaksana.

2. Dinamika PPP Kabupaten Semarang

Pemilu 2014 di Kabupaten Semarang kemaren menghasilkan perolehan suara yang kurang baik dari pemilu 2009 yang diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang. Dalam pemilu 2009 yang PPP dapat meraih 5 kursi di anggota dewan, pada pemilu 2014 turun menjadi 3 kursi dengan perolehan 49.000 suara. Hasil tersebut pada waktu itu sangat menjadi pukulan telak bagi PPP kabupaten Semarang, apalagi isu dualism yang melanda pusat sangat berpengaruh besar dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai berlambang Ka'bah' ini.

Dinamika politik yang dirasa sudah biasa dan mau tidak mau harus dihadapi oleh sebuah partai, hal itu membuat pengurus DPC Kabupaten Semarang bersungguh-sungguh

dalam mengevaluasi dan mencari solusi agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada saat itu. Melihat hasil pemilu tahun 2014, Partai berlambang Ka'bah' ini hanya berada di urutan ke tujuh dan hanya mendapatkan 3 kursi di anggota dewan.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Semarang menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi pemilu 2019. Selain menyiapkan strategi, pengurus partai berlambang Ka'bah' ini juga senantiasa membaca dinamika situasi politik yang terjadi di Kabupaten Semarang setelah pemilu 2014 lalu.

“Ketika menghadapi pemilu 2019 yang terdapat empat peserta partai politik baru tersebut, PPP berhasil mengguguli semua partai Islam, namun hanya menempati urutan kedua dalam perolehan suara. Akan tetapi dengan perolehan suara ini mengindikasikan bahwa PPP masih dipercaya untuk memegang mandat sebagai pemegang aspirasi konstituen Islam yang paling diprioritaskan. Strategi khusus untuk meraih kemenangan di pemilu 2019 itu sudah kami siapkan berdasarkan evaluasi hasil kemarin 2014 dan dinamika politik yang ada saat ini. Mulai dari plan A, B, hingga plan C. Demikian halnya dengan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan waktu itu, pun sudah kami siapkan,”⁵⁸

Ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK disinyalir hal tersebut

⁵⁸ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

mempengaruhi turunnya perolehan suara PPP ditingkat nasional bahkan di daerah. Hal itu menjadi keawatiran bersama ditingkat cabang, begitu pula di kabupaten Semarang. Namun sebaliknya kenaikan perolehan suara yang cukup luar biasa malah didapatkan di Kabupaten Semarang pada pemilu 2019 kemaren. Kenaikan suara PPP dalam pemilu kali ini menunjukkan bahwa perolehan suara untuk PPP di Kabupaten Semarang itu tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Perolehan suara PPP di Kabupaten Semarang dalam pemilu 2019 naik menjadi 67.021 suara atau 6 kursi, dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya memperoleh 39.690 suara atau 3 kursi. Dinamika politik ini tentunya sangat menarik bagi partai ber lambang Ka'bah' ini yang kemaren hanya diposisi ke tujuh sekarang diposisi ke-dua, walaupun masih sangat jauh dengan perolehan suara PDI Perjuangan diperingkat pertama, ini merupakan hasil dan kejutan bagi PPP.

E. Profil Kabupaten Semarang

Pada bagian lokasi penelitian berada pada Kabupaten Semarang penulis akan memaparkan mengenai kondisi wilayah penelitian, dan kondisi - kondisi lainnya.

1. Sejarah

Kabupaten Semarang pertama kali didirikan oleh [Raden Kaji Kasepuhan](#) (dikenal sebagai [Ki Pandan Arang II](#)) pada tanggal

[2 Mei 1547](#) dan disahkan oleh Sultan [Hadiwijaya](#). Kata "Semarang" konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II, ketika dalam perjalanan ia menjumpai deretan pohon asam (Bahasa Jawa: *asem*) yang berjajar secara jarang (Bahasa Jawa: *arang-arang*), sehingga tercipta nama *Semarang*.

Ketika masa pemerintahan Bupati Raden Mas Soeboyono, pada tahun [1906](#) Pemerintah [Hindia Belanda](#) membentuk Kotapraja (*gemente*) Semarang, sehingga terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu kotapraja yang dipimpin oleh *burgenmester*, dan kabupaten yang dipimpin oleh [bupati](#)

Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi [Jawa Tengah](#). Pada masa pemerintahan Bupati Iswanto (1969-1979), ibu kota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang)

Pada tahun [1983](#), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Semarang ke [Kota Ungaran](#) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, [Kota Ungaran](#) yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi [Kota Ungaran](#) sebagai ibu kota Kabupaten Semarang.

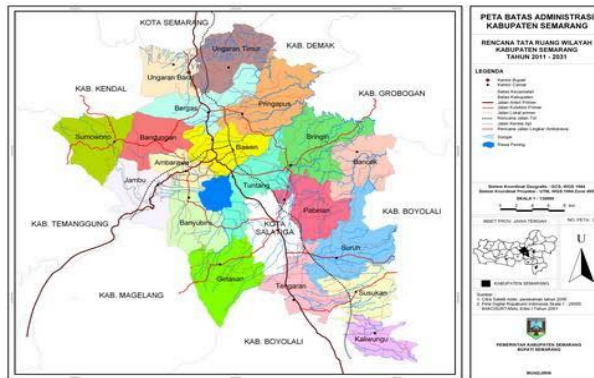
Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur, Semarang.⁵⁹

2. Wilayah Kabupaten Semarang

Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 950,21 km².

Gambar 3.2

Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 meter diatas permukaan air laut.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019*, (BPS Kabupaten Semarang, 2019),

Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata rata ketinggian terendah.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening.

Berikut:

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung

Sebelah Selatan :Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur :Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak

Sebelah Utara : Kota Semarang

Bagian Tengah : Terletak Kota Salatiga

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 950,21 Km² (95.020,674 Ha), terbagi dalam 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2015 untuk jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.565 mengalami penurunan sebanyak 14 RW dibanding tahun 2014 (1.579) hal ini dikarenakan ada tata ulang penomoran dan penggabungan RW di beberapa kecamatan. Jumlah SLS Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2015 sebanyak 6.628 RT mengalami kenaikan 11 RT dibandingkan tahun 2014 (6.617). Berikut nama-

nama kecamatan di Kabupaten Semarang beserta luas daerah masing-masing dalam tabel.⁶⁰

Table 3.4
Nama Kecamatan Beserta Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Km	Persentase %
1	Getasan	65,80	6,92
2	Tengaran	47,30	4,98
3	Susukan	48,87	5,14
4	Kaliwungu	29,95	3,15
5	Suruh	64,02	6,74
6	Pabelan	47,97	5,05
7	Tuntang	56,24	5,92
8	Banyubiru	54,41	5,73
9	Jambu	51,63	5,43
10	Sumowono	55,63	5,85
11	Ambarawa	28,22	2,97
12	Bandungan	48,23	5,08
13	Bawen	46,57	4,90
14	Bringin	61,89	6,51

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019*, (BPS Kabupaten Semarang, 2019), h 7.

15	Bancak	43,85	4,61
16	Pringapus	78,35	8,25
17	Bergas	47,33	4,98
18	Ungaran Timur	37,99	4,00
19	Ungaran Barat	35,96	3,78
	Jumlah/Total	950,21	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Table 3.5

Nama Kecamatan Beserta Desa dan Kelurahan

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Ungaran Barat	6	5
Ungaran Timur	5	5
Bergas	9	4
Pringapus	8	1
Bawen	10	2
Bringin	16	
Tuntang	16	
Pabelan	17	
Bancak	9	
Suruh	17	

Susukan	13	
Kaliwungu	11	
Tengaran	15	
Getasan	13	
Banyubiru	10	
Sumowono	16	
Ambarawa	2	8
Jambu	11	
Bandungan	9	1
Total	213	26

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

3. Topografi

Ungaran adalah ibu kota kabupaten ini, tepat berbatasan dengan Kota Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran tinggi dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah [Sungai Tuntang](#). Di bagian barat wilayahnya berupa pegunungan, dengan puncaknya [Gunung Ungaran](#) (2.050 meter) di perbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta [Gunung Merbabu](#) (3.141 meter) di barat daya.

Kabupaten Semarang dilintasi jalan negara yang menghubungkan [Yogyakarta](#) dan [Surakarta](#) dengan [Kota Semarang](#) atau lebih dikenal dengan "JOGLO SEMAR". Angkutan umum antarkota dilayani dengan bus, yakni di terminal bus Sisemut (Ungaran), Bawen, dan Ambarawa. Beberapa rute angkutan regional adalah: Semarang-Solo, Semarang-Yogyakarta, dan Semarang-

Purwokerto, sedang rute angkutan lokal adalah Semarang-Ambarawa dan Semarang-Salatiga, Salatiga - Ambarawa.⁶¹

Bawen merupakan kota persimpangan jalur menuju Solo dan menuju Yogyakarta atau Purwokerto. Jalur [kereta api](#) Semarang-Yogyakarta merupakan salah satu yang tertua di Indonesia, namun saat ini tidak lagi dioperasikan, sejak meletusnya Gunung Merapi yang merusakkan sebagian jalur tersebut. Jalur lain yang kini juga tidak beroperasi adalah Ambarawa-Tuntang-Kedungjati. Di Ambarawa terdapat [Museum Kereta Api](#). Kereta api uap dengan rel bergerigi kini digunakan sebagai jalur wisata dengan rute Ambarawa-Bedono, di samping itu telah dikembangkan kereta wisata Ambarawa-Tuntang PP dengan menyusuri tepian Rawapening.

4. Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

⁶¹ *Ibid*, h 8.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶²

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten Semarang hasil Pemilu legislatif 2014 - 2019 tersusun dari sepuluh partai, dengan perincian sebagai berikut:

Table 3.6

**Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Semarang 2014**

Partai	Kursi	%
PDI Perjuangan	11	24
Partai Kebangkitan Bangsa	5	11
Partai Golkar	5	11
Partai gerindra	5	11
Partai Kesejahteran Masyarakat	5	11
Partai Democrat	4	9
Partai Hanura	4	9
Partai Amanat Nasional	3	7

⁶² *Ibid*, h 20.

Partai persatuan pembangunan	3	7
Total	45	100

Sumber: KPUD Kabupaten Semarang.⁶³

Table 3.7

**Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Semarang 2019-2024**

Partai	Kursi	%
PDI-Perjuangan	16	32
Partai Persatuan Pembangunan	6	12
PKB	5	10
Partai Gerindra	4	8
Partai Golkar	4	8
PKS	4	8
Partai Amanat Nasional	4	8
Partai NasDem	3	6
Partai Hanura	2	4
Partai Demokrat	2	4
Total	50	100,0

⁶³ Komisi Pemilihan Ummum Daerah (KPU) Kabupaten Semarang

Sumber: KPU Kabupaten Semarang.⁶⁴

Table 3.8
Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Daftar Pemilih Tetap Pada
Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang, 2019

Kecamatan	Jml	TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap		
	Desa		Lk	Pr	Jml
Getasan	13	191	19.764	20.419	40.183
Tengaran	15	205	26.236	26.575	52.811
Susukan	13	165	19.493	19.658	39.151
Kaliwungu	11	101	11.931	12.420	24.351
Suruh	17	227	27.295	27.356	54.651
Pabelan	17	144	16.550	17.090	33.640
Tuntang	16	190	25.199	26.382	51.581
Banyubiru	10	143	16.529	17.184	33.713
Jambu	10	137	15.490	15.780	31.270
Sumowono	16	101	13.284	13.275	26.559
Ambarawa	10	194	22.936	24.307	47.243

⁶⁴ *Ibid*,

Bandungan	10	182	21.880	21.880	43.760
Bawen	9	168	21.027	21.733	42.760
Bringin	16	152	17.820	18.325	36.145
Bancak	9	75	9.163	94.58	18.621
Pringapus	9	169	19.731	20.306	40.037
Bergas	13	206	24.607	25.565	50.172
Ungaran Timur	10	227	26.985	28.074	55.059
Ungaran Barat	11	205	27.877	28.074	55.951
Jumlah	235	3.182	383.734	395.259	778.993

Sumber: KPUD Kabupaten Semarang.⁶⁵

5. Kependudukan

Administrasi Kependudukan Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 756.216 orang atau 98,59% dari jumlah penduduk wajib KTP. Jumlah penduduk umur 18 tahun ke bawah yang memiliki akta kelahiran sebanyak 273.322 orang atau 93,58% dari jumlah penduduk umur 18 tahun ke bawah.

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Selain Sensus Penduduk, untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan diantara dua periode sensus, BPS melakukan Survei Penduduk Antar

⁶⁵ *Ibid*,

Sensus (SUPAS). SUPAS telah dilakukan sebanyak lima kali, tahun 1976, 1985, 1995, 2005 dan 2015. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga Negara asing kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya. Berbeda dengan pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, Sensus Penduduk 2010 hanya melaksanakan metode pencacahan lengkap termasuk pula anggota rumah tangga Korps diplomatik RI yang tinggal di luar negeri. Sensus Penduduk 2010 dilakukan serentak diseluruh tanah air mulai tanggal 1-31 Mei 2010.⁶⁶

Table 3.9

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang, 2014-2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)	
	2014	2018
Getasan	49.823	51399
Tengaran	68.326	72207
Susukan	43.771	44071

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019*, (BPS Kabupaten Semarang, 2019), h 73.

Kaliwungu	26.558	26657
Suruh	60.168	60424
Pabelan	38.816	40099
Tuntang	63.549	66573
Banyubiru	41.927	43462
Jambu	38.165	39583
Sumowono	30.361	30904
Ambarawa	60.881	63193
Bandungan	55.366	57849
Bawen	58.815	63437
Bringin	42.277	43306
Bancak	29.166	20098
Pringapus	54.363	58380
Bergas	77.503	87609
Ungaran Timur	76.103	84196
Ungaran Barat	80.659	87182

Jika dilihat dengan total jumlah penduduk Kabupaten Semarang, maka agama Islam mendominasi mayoritas agama penduduk di Kabupaten Semarang, diikuti oleh agama Kristen Protestan, kemudian Khatolik, Buddha dan Konghucu dan Hindu menjadi minoritas di Kabupaten Semarang.⁶⁷

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019*, (BPS Kabupaten Semarang, 2019), h 159.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. PELEMBAGAAN PARTAI

1. Derajat Kesisteman (*Systemness*)

Tujuan dari bab ini untuk menjelaskan bagaimana pelebagaan PPP kabupaten Semarang dalam proses pelebagaannya dari derajat kesistemannya yang diantaranya meliputi demokrasi internal, keutuhan organisasi, sistem kaderisasi dan peran tokoh di dalamnya seperti apa yang sudah di paparkan dalam bab sebelumnya. Ada tiga indikator untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi penataan yaitu penerapan demokrasi internal partai, sistem dan kaderisasi partai, serta kohesivitas partai.⁶⁸

a) Demokrasi internal

PPP Kabupaten Semarang dalam menerapkan demokrasi internalnya sepenuhnya berpedoman pada mekanisme, syarat atau prosedur yang telah disepakiti bersama di dalam AD/ART. Di dalam sebuah organisasi atau partai politik

⁶⁸ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 17.

AD/ART menjadi suatu hal yang penting, karena semua kebijakan, keputusan atau hal-hal yang menyangkut kepentingan partai politik atau seluruh anggota partai politik harus berpedoman pada AD/ART yang telah disepakati bersama. Hal itu dilakukan agar bisa memberi kesempatan bagi seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat didalam setiap pengambilan keputusan.⁶⁹ Maka dari itu PPP Kabupaten Semarang lebih mengedepankan proses musyawarah dalam setiap pembuatan kebijakan atau peraturan dalam perumusan kebijakan tertentu.

Selain berpedoman sepenuhnya pada AD/ART, PPP Kabupaten Semarang juga memiliki kegiatan rutin bulanan yang diantaranya disitu juga membahas kegiatan-kegiatan kedepan dan isu-isu politik ringan yang tentunya tidak lepas dari kebutuhan partai. Dalam kegiatan tersebut juga sebagai ajang musyawarah untuk menentukan sebuah kebijakan atau keputusan yang sifatnya tidak urgen, akan tetapi tetap dalam konteks musyawarah, seperti apa yang disampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Yaa dalam musyawarah bulanan seperti itu sifatnya mengalir, segala keputusan atau kebijakan yang sifatnya biasa seperti besok ada acara apa, ketuanya siapa, PJ nya siapa, acaranya dimana, ijin tempat pak Lurah pak RT sudah apa belum, kalau belum besok kamu ya yang mengurusnya, kan seperti itu, tidak perlu voting atau

⁶⁹ *Ibid. h 17.*

apa, itu yang menurut saya kebijakan yang sifatnya biasa tidak urgen.”⁷⁰

Namun untuk kebijakan-kebijakan yang strategis dan penting, seperti pemilihan Ketua DPC, penentuan daftar calon legislative, dan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama secara luas dan penting, itu harus diputuskan dengan rapat seperti apa yang sudah tertuang didala AD/ART PPP Kabupaten Semarang. Seperti apa yang sudah disampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Untuk putusan-putusan yang penting seperti pemilihan ketua DPC dan jajarannya itu tetep acuan kita AD/ART, namun dalam mekanismenya kita menggunakan sistem demokrasi yg diatur oleh AD/ART sesuai hasil muktamar 7 tahun 2016 Pondok gede Jakarta. Di dalam AD/ART kita itu menggunakan sistem formatur yang jumlahnya 5 orang yang berasal dari satu dari DPP, satu dari DPW, satu dari DPC domisioner, satu dari majelis DPC periode yg akan datang, dan satu dari PAC yang diusulkan atau dipilih, dan lima orang ini menjadi formatur dan diberi kewenangan untuk menyusun kepengurusan, terutama ketua seketaris dan bendahara. Kemudian penentuan bakal calon bupati atau daftar calon legislative seperti itu ya harus sesuai rapat yang sah. Tidak bisa saya semena-ena menentukan ini itu, siapa calegnya, siapa calon bupatinya dan seterusnya.”⁷¹

⁷⁰ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

⁷¹ *Ibid.*

Dalam demokrasi internal PPP Kabupaten Semarang seperti halnya apa yang sudah diuraikan di atas dan wawancara, menurut penulis menjadi sebuah indicator bahwa PPP Kabupaten Semarang telah melakukan demokrasi internal sesuai apa dalam teori Randaall dan Svansand bahwa sebuah partai dikatakan melembaga sesuai derajat kesistemannya selain bagaimana partai politik mengelola demokrasi internalnya, dan menjaga keutuhan organisasinya, rekrutmen anggota dan pengurus yang sesuai prosedurnya merupakan salah satu indicator partai itu sudah memenuhi derajat kesistemannya.⁷²

b) Keutuhan Organisasi

Dari hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan organisasi PPP Kabupaten Semarang relative tidak ada masalah yang signifikan, perpecahan dualisme yang terjadi di pusat memang menjadi pukulan bagi cabang-cabang di daerah, belum lagi kasus-kasus yang menjerat politisi-politisi PPP di tingkat Nasional, itu menjadi catatan penting bagi cabang-cabang untuk tetap bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat kepada Partai berlambang Ka'bah' itu.

Dinamika organisasi yang pasang surut dan berbagai isu permasalahan internal yang beredar saat ini di tubuh PPP,

⁷² Randal, dan Svasand, tentang "Party Institutionalization in New Democracies", *Party Politics*, SAGE Publications, (Volume 8, No. 1, Januari, 2002) h. 17

sangat rawan menimbulkan perpecahan atau krisis kepercayaan kepada pimpinan yang pada saat ini dialai oleh partai berlambang Kak'bah; di tingkat nasional ini. Tetapi hal ini dirasa tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Semarang. Sebagai buktinya bahwa hasil pemilu 2019 kemaren melonjak jauh dari pada hasil pemilu 2014 lalu yang dirasa bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Semarang terhadap PPP masih sangat baik terlepas hasil PPP di tingkat Nasional yang menurun

Dalam wawancaranya dengan Wakil Ketua bidang informasi dan teknologi DPC PPP Kabupaten Semarang Tri Pranoto;

“Dinamika Organisasi sebenarnya sudah biasa, dan orang senang juga tidak senang juga sudah biasa, tapi Alhamdulillah selama kepemimpinan pak Nurul Huda menjadi ketua DPC PPP Kabupaten Semarang ini tidak ada konflik yang signifikan, bahkan permunculan isu-isu perpecahan itu tidak ada, beda dengan sebelumnya yang muncul dualisme dari pusat sampai bawah. Menurut saya itu akibat pengendalian konflik oleh pimpinan dirasa lemah, sehingga memunculkan konflik internal yang bisa mengancam keutuhan organisasi. Tapi ya Alhamdulillah dalam kepemimpinan pak Nurul Huda dan kesolitan teman-teman saat ini isu-isu perpecahan dapat kami minimalisir, walaupun ada itu kecil dan bisa diselaraskan kembali dan kami di DPC sudah berkomitmen dan mempunyai tekad bersama untuk terus bergerak bersama rakyat dan

menjalankan organisasi ini sesuai peraturan atau AD/ART yang ada”.⁷³

Meskipun diakui oleh pengurus PPP Kabupaten Semarang tentang dualisme PPP nasional dan imbasnya ke Cabang, tetapi hal itu tidak sampai menimbulkan konflik internal yang signifikan dalam tubuh partai. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh narasumber dalam wawancara penulis, dinamika organisasi atau konflik internal sudah pasti ada dan tidak bisa dihindari, tapi dalam PPP Kabupaten Semarang dalam hal itu selalu bisa diredam atau di selesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Dalam kasus ini, peran pemimpin dan ketegasannya sangat bearti untuk menjaga keutuhan organisasi partai.

Dalam wawancaranya dengan anggota DPC PPP Kabupaten Semarang Burhan;

“Konflik dualisme kubu Romi dan Djan Faridz sebenarnya sampai ke cabang DPC PPP Kabupaten Semarang ini, tetapi yang saya ketahui kemaren pak Nurul Huda bilang kita jangan terlalu fanatic ke salah satu kubu, kita itu sama di PPP, mau tidak mau kita harus ikut aturan yang sudah ada dalam AD/ART. Ada salah satu anggota yang tidak satu pendapat, akhirnya anggota itu keluar dan pindah kepartai lain. Ya seperti itulah yang namanya politik pastinya

⁷³ Tri Pranoto (Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Informasi DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Kantor Fraksi PPP Kab. Semarang, 5 Maret 2020, pukul 12.30 WIB

memilih yang dirasa lebih menguntungkan untuk dirinya”.⁷⁴

Walaupun tidak ada konflik secara signifikan yang engancam keutuhan organisasi, tetapi selain masalah dualisme kubu Romi dan Djan Farid, gesekan perebutan suara yang bukan hanya terjadi antar partai politik juga terjadi. Persaingan antar calon anggota legislatif (caleg) di internal partai politikpun akan sengit. Kompetisi antar calon anggota legislatif di internal partai politiknya masing-masing sangat kompetitif. Persaingan tersebut pasti akan terjadi karena setiap individu berlomba-lomba untuk mendulang suara yang banyak, bahkan saling menginjak antar caleg dalam satu partai.

Seperti yang disampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

"Dengan sistem yang sekarang ini, selain bersaing dengan partai lain dan caleg lain. Peserta pemilu juga harus bersaing dengan internalnya masing-masing. Persaingan dalam internal partai sendiri juga makin keras, tidak dapat dipungkiri pasti ada gesekan diantara caleg, jika ada perselesihan seperti itu, caleg yang berselisih kita panggil dan kita musyawarahkan secara kekeluargaan dan sesuai prosedur. Disinilah peran pemimpin

⁷⁴ Burhan (Anggota DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di kantor DPC PPP Kabupaten Semarang, 27 Maret 2020, pukul 11.30 WIB

itu penting dan harus bisa mencari jalan keluar atau solusi yang bisa diterima kedua belah pihak yang bersiteru."⁷⁵

Melihat uraian wawancara diatas bagaimana Ketua dan DPC PPP Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dari dualisme kubu Romi dan Djan Faridz dan perselisihan antar caleg internal PPP yang saling injak antar caleg diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan mengacu pada aturan AD/ART yang ada.

Dalam keutuhan organisasi PPP kabupaten Semarang, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bahwasanya DPC PPP Kabupaten Semarang Manpu menyelesaikan masalah dan menjaga keutuhan organisasinya dengan baik, sehingga dapat hasil yang lebih baik dalm peilu 2019.

c) Keanggotaan dan Kaderisasi

Dalam setiap organisasi, anggota merupakan sumber dukungan utama. Dalam organisasi partai politik, peran anggota signifikan karena melalui para anggota ini akan berperang sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarkan platform dan program partai kepada masyarakat. Selain itu, anggota merupakan sumber

⁷⁵ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

kaderisasi yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin partai politik.⁷⁶

Selain rekrutmen anggota, partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota-anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan Negara.

PPP merupakan partai yang terbuka dalam proses kaderisasi dan perekrutan simpatisan-simpatisan partainya, sesuai apa yang ada di dalam AD/ART partai tentang keanggotaan yang sudah dijelaskan di bab dua anggaran dasar rumah tangga pasal dua, keanggotaan terdiri dari anggota biasa, anggota kader, anggota kehormatan. Untuk mengisi keanggotaan tersebut, partai politik melakukan rekrutmen anggota. Partai politik yang baik tentu tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggotanya. Dengan demikian, tidak akan sembarangan seseorang secara otomatis dapat memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu.

⁷⁶ Lili, Romli, reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia (Vol.2, No. 2, November 2011) h. 211

Untuk persyaratan tiga tipe keanggotaan itu sudah ada dalam pasal tiga seperti;

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Biasa PPP:
 - (a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - (b) Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Program Perjuangan PPP;
 - (c) Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP;
- 2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP:
 - (a) memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - (b) mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang.
- 3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP,
 - (a) berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
 - (b) sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visi sejalan dengan PPP;
 - (c) tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi Anggota Kehormatan.⁷⁷

Seperti apa yang telah penulis amati dan wawancara bersama salah satu anggota Yogi Pratama;

⁷⁷ AD/ART PPP hasil Muktamar VIII 2016

“Saya dulu mulai bergabung pada PPP sekitar umur 19 tahunan setelah lulus bangku sekolah, karena ya mayoritas pemuda-pemuda di kampung saya adalah anggota PPP, dan bapak saya juga simpatisan PPP saya ya gabung saja. Kemudian saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan PPP, kemudian sanggup menerima dan mematuhi AD/ART”.⁷⁸

Dalam wawancaranya dengan anggota DPC PPP Kabupaten Semarang Burhan juga menyampaikan bagaimana kaderisasi di PPP ini;

“Yang saya ketahui proses kaderisasi dalam PPP selama ini masih melihat keluarga dan lingkungan. Saya dulu gabung PPP yak arena bapak saya PPP, kemudian lingkungan saya PPP. Bukan karena mmelihat nilai atau tujuan PPP, saya belum mikir sampai situ. Inilah mmenurut saya yang kurang dari PPP saat ini”.⁷⁹

Seperi apa yang telah di ungkapkan oleh salah satu nara sumber yang merupakan anggota PPP, ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda juga menjelaskan dalam wawancaranya dengan penulis mengenai keanggotaan dan kaderisasi;

⁷⁸ Yogi Pratama (anggota DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Kantor fraksi PPP, 5 Maret 2020, pukul 12.30 WIB

⁷⁹ Burhan (Anggota DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di kantor DPC PPP Kabupaten Semarang, 27 Maret 2020, pukul 11.30 WIB

“Kalau saya ditanya bagaimana proses kaderisasi atau perekrutan anggota, ya kalau di PPP sendiri siapa saja boleh jadi anggota, yang penting mau menerima dan mematuhi AD/ART, kemudian mau berkegiatan bersama, itu saja sudah bisa saya katakan menjadi anggota, syukur kalau mau mengikuti pelatihan-pelatihan yang biasanya di adakan oleh partai. Kaderisasi dan pendidikan politik kami lakukan dalam rangka untuk mencetak pemimpin yang baik. Oleh karena itu, kami melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler. Pendidikan dan pelatihan ini kami lakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas”.⁸⁰

Selain anggota biasa, dan anggota kader, Proses kaderisasi yang dilakukan untuk pengurus, pengusaha-pengusaha, Kyai-Kyai, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat di lingkup partai juga intens dilakukan. Seperti yang disampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Untuk kader-kader kehormatan biasanya banyak yang dari kalangan orang-orang besar biasanya, biasanya menjelang pemilu

⁸⁰ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

itu biasanya cukup banyak yang menyamapaikan ketertarikannya kepada PPP dan ingin bergabung, ya maksudnya ingin mencalonkan diri lewat PPP. Selama visi dan misinya sejalan dan searah dengan apa yang ada di partai ya silahkan, walaupun disisilain juga partai ada proses kaderisasi untuk hal-hal semacam itu”.⁸¹

Dari apa yang telah disampaikan nara sumber mengenai proses kaderisasi di dalam PPP. Bahwa kader PPP tidak lebih hanya sebagai kader dari unsur penyokongnya. Ini berarti secara internal PPP belum memiliki sistem kaderisasi yang baik.

Dalam hal ini PPP memiliki dua kelemahan mendasar sekaligus secara nasional yang berimbas kedaerah. *Pertama*, secara internal PPP belum memiliki jenjang kaderisasi yang kokoh dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Padahal kaderisasi bukan sekedar gerakan untuk menjamin kesinabungan partai, namun wahana persemaian karakter dan ideologi.⁸² *Kedua*, PPP tidak memiliki organisasi sayap mahasiswa, seperti PDI ada GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), PKB ada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islamm Indonesia), PKS memiliki KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia),

⁸¹ *Ibid*,

⁸² Aziz, Abdul, Politik Islam Politik (Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam, Tiara Wacana 2016. H 181.

atau PAN yg memiliki IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).

Walaupun proses keaggotaan dan kaderisasi PPP Kabupaten Semarang sesuai dengan apa yang ada dalam Ad/ART, tapi beberapa kelemahan seperti diatas tetap perlu diperhatikan.

d) Peran dan pengaruh tokoh

Langkah pertama dalam politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.

Pada hakikatnya, suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan, terutama memenangkan pemilihan umum.

Ketika sistem politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan pesan politik saja, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seseorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Dalam PPP peran Kyai cenderung lebih kuat biasanya, dalam partai-partai yang berasaskan Islam. Peran tokoh Kyai atau Kyai siapa yang berada dibelakangnya itu menjadi hal yang cukup penting, Seperti yang disampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Secara umum kyai yang terkenal ya kyai lokal saja, yang kita berikan kepercayaan, seperti dulu Kyai Abdu Hanif tapi sudah almarhum, dan kebetulan Kyai-kyai yang di periode ini beberapa sudah pada wafat, tapi masih ada beberapa yg masih populer di kabupaten semarang seperti Bpk Kyai Jumadin Achmad salis, dia adalah mubalig yg sering menjadi pembicara di kabupaten semarang dan sekitarnya, Cuma memang kalau saya lihat dalam demokrasi kita apakah itu partai islam maupun partai nasionalis, ini nyaris peran ketokohan itu hampir terlupakan saat pemilu, sekarang masyarakat itu kalah dengan politik pragmatise seperti serangan fajar, pembelian suara, politik uang dll. Oleh karena itu kemudian setelah masyarakat

diserang dengan politik seperti itu jadi membuat peran ketokohan menjadi minim, yang dulu peran tokoh itu penting semisal Kyai ini ikut ini jamaahnya atau masyarakat sekitarnya ikut ini, tapi setelah ada politik pragmatism masyarakat jadi lupa dengan pak Kyainya”⁸³

Dari apa yang disampaikan narasumber diatas, peran tokoh didalam politik sekarang sudah sangat berkurang. Politik pragmatis dan politik uang sekarang yang berbicara. Dalam parati PPP Kabupaten Semarang Sekarang tidak bisa lagi mengandalkan tokoh-tokoh agama yang menjadi andalannya dulu.

2. Derajat Penanaman Nilai (*Value Infusion*)

Identitas partai dilandasi oleh ideologi dan platform partai politik, yang berkaitan dengan basis sosial pendukungnya dan identifikasi kader terhadap pola dan arah perjuangan. Identitas nilai tidak hanya terlihat pada pola arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial pendukung.⁸⁴

Ideologi, yang merupakan sistem nilai dan norma, tentu masih bersifat abstrak. Perlu ada penjabarannya lebih lanjut. Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti

⁸³ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

⁸⁴ Vicky, Randall dan Svasand, tentang “Party Institutionalization in New Democracies”, *Party Politics*, SAGE Publications, Volume 8, No. 1, Januari, 2002

tentang ideologi atau nilai, yang bersifat abstrak itu, yang dianut oleh suatu partai politik.⁸⁵

Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

Berikut mengenai gambaran basis dukungan dan klientisme dalam partai.

1) Basis Dukungan Partai

PPP sebagai sebuah partai yang telah lama berkiprah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. PPP tentunya memiliki organisasi-organisasi yang cukup banyak sebagai basis dukungan partai. Selain itu juga. PPP merupakan salah satu partai yang berasaskan Islam, tentunya sudah jelas bahwa basis dukungan PPP adalah mayoritas masyarakat Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Hubungan PPP Kabupaten Semarang dengan organisasi-organisasi internalnya seperti GPK Gerakan Pemuda Ka'bah',

⁸⁵ Lili, Romli, reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia (Vol.2, No. 2, November 2011) h. 204

WPP Wanita Persatuan Pembangunan itu sangat masih sangat kurang. Seperti apa yang telah disampaikan oleh nara sumber dalam wawancara dengan penulis, ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Kalau organisasi-organisasi sayap PPP selama ini seperti GPK ataupun WPP itu masih minim perannya dalam memberi kontribusi ke partai, yaa ada tapi masih kecil. Mereka itu seperti lahir tapi bukan dari Rahim PPP yang artinya adalah mereka ada itu ya sebatas sekumpulan kader atau anggota yang menghimpun membuat gerakan seperti itu, sudah beberapa kali di upayakan untuk mentertipkan tapi ya kalau dari PPP kabupaten semarang masih sulit, kurang tau kalau didaerah lain.”⁸⁶

Secara umum dilihat dari hasil wawancara memang ada keinginan untuk senantiasa mengatur atau memfasilitasi kegiatan mereka, tapi belum maksimal yang dilakukan oleh PPP. Ini mungkin yang menjadi salah satu kelemahan dalam tubuh PPP Kabupaten Semarang sendiri dalam derajat penanaman nilai seperti apa yang telah dilakukan oleh partai besar lainnya yang banyak memiliki sayap organisasi dari bawah sampai atas seperti halnya sayap mahasiswa seperti PDIP ada GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), PKB ada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PKS memiliki KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

⁸⁶ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

Indonesia), atau PAN yang memiliki IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).

Basis dukungan PPP yang mayoritas Islam, dalam pemilu secara tidak langsung menjadi ajang gulat diarena yang sama yakni sama-sama merebutkan simpati dan suara orang mukmin yang juga jadi rebutan oleh partai islam lainnya. Hal ini menandakan bahwa Partai Islam adalah partai eksklusif dalam lingkungan umat Islam. Itupun masih dapat dikatakan dengan yang masih satu aliran, seperti NU dan Muhammadiyah. Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Partai-partai Islam bila boleh dikatakan sebenarnya bertarung pada arena yang sama yakni sama-sama merebutkan simpati dan hendak mendulang suara dari kaum muslim di Kabupaten Semarang, Hanya sayangnya total penduduk muslim yang ada di Kabupaten Semarang ini belum sepenuhnya berminat pada partai-partai yang formalismenya Islam, dengan melihat hasil perolehan suara PDIP dalam pemilu 2019.”⁸⁷

Namun demikian, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh partai adalah melalui program, yang program itu bisa menjempatani hubungan paratiai dengan kelompok-

⁸⁷ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

kelompok asyarakat, seperti kelompok tani, kepemudaan desa, kelompok pengajian maupun ibu-ibu rumah tangga.

2) Pengaruh Klientalisme dalam Partai

Sebagaimana diuraikan oleh skripsinya Lutfi bahwa dengan sistem rekrutmen anggota dan pengurus partai yang terkesan tidak didasarkan pada kompetensi ideologi, menyebabkan komitmen kader terhadap partai masih rendah. Artinya bahwa kader-kader yang bergabung dalam partai bukan karena kesamaan ideologi serta adanya harapan kesamaan *platform* dengan partai.⁸⁸ Beberapa dari mereka yang bergabung menjadi anggota hanya didasarkan karena adanya hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan salah seorang elit partai. Seperti apa yang disampaikan oleh nara sumber yang merupakan anggota PPP Yogi Pratama;

“Saya bergabung dulu yak arena mayoritas pemuda-pemuda di kampung saya adalah anggota PPP, dan bapak saya juga simpatisan PPP saya ya gabung saja. Kemudian saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan PPP, kemudian sanggup menerima dan mematuhi AD/ART. Sampai sekarang ya saya di PPP”.⁸⁹

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh klientisme dalam partai masih tinggi, di mana beberapa

⁸⁸ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 32.

⁸⁹ Yogi Pratama (anggota DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Kantor fraksi PPP, 5 Maret 2020, pukul 12.30 WIB

anggota yang bergabung tidak didasarkan karena kesamaan ideologi maupun *platform* dari partai, tetapi cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai).⁹⁰ Rendahnya kesadaran para kader maupun anggota partai dalam melaksanakan amanah partai yang didasarkan atas ideologi dan platform partai, berdasar dari temuan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya karena ketidakmampuan partai itu sendiri untuk menanamkan nilai-nilai dasar partai. aMulai dari proses rekrutmen anggota, pola kaderisasi, sampai kepada menjaga hubungan dengan organisasi internal maupun eksternal yang ada.

Tapi dalam PPP Kabupaten Semarang ini cukup bisa disiasati dengan kegiatan-kegiatan yang pro dengan rakyat. Kesulitan dalam mengelola organisa dan kekompakan dan menggear semua kegiatan membuat hasil PPP Kabupaten dipemilu 2019 mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Memang saya akui untuk proses kaderisasi dan hubungan dengan organisasi-organisasi sayap PPP masih lemah, akan tetapi kemaren saya mencoba tidak larut dalam hal itu. Berkat semangat teman-teman dan kesulitan kerja keras tanpa lelah dengan slogan bergerak bersama rakyat, Alhamdulillah

⁹⁰ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 33

perolehan suara kita naik hamper dua kalilipat dari pemilu sebelumnya. Itu berate ada sebuah sistem yang berjalan, walaupun tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada.”⁹¹

Menurut lutfi Sikap pragmatisme seperti inilah yang menyebabkan sebagian kader bergabung hanya untuk mendapatkan posisi tertentu atau keuntungan material lainnya. Ketika kepentingan tersebut kemudian tidak diakomodir, maka sangat dimungkinkan kader-kader tersebut akan keluar dan berpindah ke partai lain.⁹² Namun hal itu bisa di minimalisir dengan beberapa anggota-anggota yang solid ditubuh PPP, sehingga PPP cukup berhasil dalam pemilu 2019 kemaren di Kabupaten Semarang.

3. Derajat Otonomi

Dalam otonomi ada dua yang penulis pantau yaitu kemandirian pengambilan keputusan yang akan dipahami pertama, keuangan partai dan kemandirian pengambilan keputusan. Keduanya sangat berhubungan dengan aliran dana dari mana dan apakah ada pengaruh pengambilan keputusan didalam. Hal yang terpenting dari dimensi ini adalah: pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen. Kedua, apakah

⁹¹ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

⁹² Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h 34.

keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai.⁹³

1. Keuangan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang

Dari hasil wawancara penulis mengenai keuangan PPP Kabupaten Semarang dengan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, PPP masih mengandalkan dana dari APBD dan potongan fraksi dari anggota DPR dan iuran khas anggota setiap bulannya seperti apa yang telah di sampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Nurul Huda;

“Mengenai keuangan partai atau pembiayaannya kita masih bergantung pada APBD yang nilainya seratusan juta lebih sedikit dan potongan fraksi dari teman-teman yang jadi kemaren dengan total semua sekitar 54 juta, itu ya sekitar 9 juta per orang jika dibagi 6 kursi jatah kita PPP, dan ada iuran khas anggota kita juga yang dilakukan setiap sebulan sekali yang memang itu menjadi agenda rutin pengurus dan anggota DPC PPP Kabupaten Semarang. Walaupun demikian PPP Kabupaten Semarang mampu memberi 500 ribu per ranting dalam setiap bulannya”.⁹⁴

Idealnya, partai politik disebut melembaga apabila semua keputusan politik yang dibuat partai terbebas dari intervensi pihak luar. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada sumber pendanaan parpol. Rumusan ini sejalan dengan *framing* yang diberikan Huntington tentang otonomi partai sebagai salah

⁹³ Sigit, Pamungkas, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism

⁹⁴ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

satu kriteria pelembagaan. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran. Karena itu, otonomi sebuah partai akan semakin kuat jika biaya hidup parpol berasal dari mekanisme pendanaan internal partai itu sendiri. Seperti apa yang sudah tercantum dalam AD/ART BAB XII tentang keuangan Pasal 78 ayat (1) Keuangan PPP diperoleh dari:

- a. Uang pangkal dan iuran anggota
- b. Iuran wajib anggota yang duduk sebagai Anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Lembaga Pemerintahan lainnya
- c. Penerimaan yang halal dan tidak mengikat
- d. Bantuan dari Negara/Pemerintah.⁹⁵

Sesuai AD/ART dan hasil wawancara penulis keuangan PPP Kabupaten Semarang bisa disimpulkan sudah cukup memenuhi derajat otonomi sesuai dengan apa yang disebutkan tentang derajat otonomi oleh Wawan E. Kuswandoro menurut teori Randall dan Svansand bahwa suatu partai politik dalam pembuatan keputusan, yang disebutkannya berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber

⁹⁵ AD/ART PPP hasil Muktamar VIII 2016

dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).⁹⁶

Upaya-upaya lain seperti apa yang sudah diuraikan di atas, PPP Kabupaten Semarang dalam memperoleh dana adalah dari iuran kas anggota yang dilakukan setiap bulan. Tetapi hal seperti ini masih sangatlah minim melihat begitu banyaknya agenda dan kegiatan partai yang begitu banyaknya. Selain itu juga partai juga menerima sumbangan atau bantuan-bantuan dari pihak lain.

Seperti apa yang di sampaikan Lutfi dalam tulisannya. Walaupun dengan cara ini dapat dikatakan tidak keliru, namun dengan ketergantungan pada cara-cara yang pragmatis ini, dapat berakibat pada otonomi/kemandirian partai dalam pengambilan keputusannya. Karena hal ini dapat dijadikan alat oleh donator- donatur tersebut untuk menguasai partai melalui kemampuan finansial yang dimilikinya.⁹⁷

2. Kemandirian Partai dalam pengambilan keputusan

Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat keputusan mengenai keadaan, aktivitas perihal

⁹⁶ Wawan Kuswandro, Teori Pelembagaan Partai Politik Randall Dan Svansand, artikel 1 November, 2015

⁹⁷ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 25.

keputusan, dan aktivitas masyarakat atau anggota perihal kebijakan.⁹⁸ Empat faktor ini beserta subfaktornya saling memengaruhi.

Seperti apa yang telah di sampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Nurul Huda;

“Bicara otonomi PPP sangat otonom menurut saya dari pada parpol lainnya, karena PPP dalam berbagai keputusan yg menyngkut keputusan di level Kabupaten diserahkan semua ke kabupaten, seperti pilkada sekarang, otonomi daerah diberikan sepenuhnya ke kita, nanti keputusannya di putuskan melalui putusan partai mlalui rapat cabang, kemudian di berikan ke DPW untuk diberikan surat rekomendasi ke DPP atau pusat”.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan nara sumber diatas bahwasanya otonomi dalam pengambilan keputusan PPP kabupaten Semarang Sepenuhnya di pegang oleh DPC Kabupaten Semarang.

4. Derajat Pengetahuan Publik (*Reification*)

Reification adalah bagaimana partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. secara konseptual, partai politik yang bisa mencitrakan dengan baik di mata publik, partai itu akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Sebaliknya, jika suatu partai di mata publik memiliki citra yang tidak diinginkan oleh

⁹⁸ Ramlan, surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Grasindo, 2010), h, 248.

⁹⁹ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

publik, maka kecenderungan untuk diabaikan oleh publik juga akan cukup tinggi. Menurut Lutfi pada kenyataannya saat ini partai-partai politik berupaya untuk selalu tampil sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Upaya pencitraan partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di masyarakat.¹⁰⁰

Berikut upaya Partai Persatuan pembangunan Kabupaten Semarang dalam pencitraan di dalam daerah.

a) Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

Kiprah partai PPP Kabupaten Semarang dari 2014 sampai 2019 patut kita syukuri, bahwa eksistensi PPP masih diakui, ini terbukti PPP dalam perolehan suara pada pemilu 2019 yang lalu memperoleh suara cukup banyak, meskipun secara keseluruhan masih jauh dibawah Partai PDI Perjuangan yang berada di peringkat pertama, tapi PPP mampu mengungguli partai besar lainnya seperti PKB, PKS, maupun Golkar yang berada dibawahnya.

PPP Kabupaten Semarang sekarang berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebanyak 6 (enam) orang. Sedangkan di pemilu tahun 2014, PPP hanya mampu mendapatkan 3 (tiga) kursi saja. Ini merupakan kiprah yang cukup bagus, di tengah isu-isu dan gelombang kasus yang menimpa PPP secara nasional.

¹⁰⁰ Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 34

Akan tetapi PPP Kabupaten Semarang masih diberi kepercayaan lebih oleh masyarakat Kabupaten Semarang.

Hasil baik itu tidak lepas dari kerja keras jajaran pengurus di tingkat DPC sampai dengan PAC yang saling bahu-membahu bagaimana partai Ka'bah' bisa terus menunjukkan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat yang semakin lama telah kehilangan kepercayaannya terhadap partai-partai berasaskan islam.

Seperti apa yang telah di sampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang, Nurul Huda;

“Undang-undang pemilu kita sebenarnya bahwa peserta pemilu adalah partai politik, tapi kenyataannya yang bertarung adalah orang-orangnya atau calegnya, maka saya simpulkan bahwa anggota yang jadi adalah hasil kerjasama caleg internal dan kader-kader yang ada di dalamnya, ketika dapat hasil, maka hasilnya di bagi-bagi, istilahnya jadi tidak jadi kita gaji, itu yang membedakan kami dengan partai-partai yang lain dan ditahun-tahun sebelumnya”.¹⁰¹

Politik gotongroyong dan slogan bergerak bersama rakyat nampaknya cukup membuahkan hasil, kenaikan perolehan suara disetiap dapil itu menunjukkan bahwa tidak ada persaingan atau blok-blok dalam tubuh PPP saat pemilu. Politik gotongroyong yang diserukan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang adalah dimana semua komponen dalam tubuh PPP

¹⁰¹ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

merupakan bagian dari keberhasilan PPP. Maka dari itu jadi tidak jadi dalam pemilu nanti akan mendapatkan gaji, seperti apa yang disampaikan ketua DPC PPP Kabupaten Semarang

b) Kiprah Partai di Masyarakat

Salah satu cara yang paling penting dilakukan oleh partai untuk dapat menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya dengan melalui kiprah partai di masyarakat. Kiprah partai di masyarakat adalah dengan melalui kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal kader partai.¹⁰² Kegiatan yang dimaksud adalah pengenalan partai seperti dengan symbol-simbol, atau pelatihan yang tujuannya menanamkan ideologi. Sehingga keberadaan partai bisa diketahui oleh publik.

Kegiatan-kegiatan PPP Kabupaten Semarang dalam mengenalkan PPP di masyarakat tentunya harus diiringi dengan komunikasi politik yang baik, bagaimana meyakinkan masyarakat dengan berbagai kegiatan maupun strategi. Sehingga bisa memunculkan citra yang baik untuk masyarakat dalam menilai partai.

Strategi politik yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Semarang bertujuan untuk meningkatkan perolehan suara di Kabupaten Semarang, dalam hal ini PPP Kabupaten Semarang melakukan strategi pengetahuan publik dengan komunikasi

¹⁰² Lutfi, Muhammad, Tesis *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)*. h. 17.

politik berdasarkan usia dalam menjalankan strategi politiknya, berikut adalah langkah-langkah strategi dalam pengetahuan publik oleh PPP Kabupaten Semarang dalam menarik simpati pemilih dari kalangan pemuda dan orang tua.

1) Strategi Komunikasi Politik PPP Kabupaten Semarang Untuk Kalangan Pemuda

Kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh PPP Kabupaten Semarang dalam rangka menggaet pemilih dari kalangan pemuda, tentunya ada banyak hal yang harus di perhatikan, karena selama ini PPP identic dengan partainya orang tua. Membangun citra pusalah satunya mengadakan Turnamen futsal atau kampanye terbuka di Kabupaten Semarang dengan mendatangkan artis. Untuk mengubah mindset masyarakat yang biasanya PPP mengadakan kampanye dengan hal-hal yang bernuansa religi seperti marawis, qosidah atau pengajian yang mengundang sedikit partisipan masyarakat pemilih untuk datang ke kampanye tersebut.

Seperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“untuk menarik perhatian atau membangun citra publik biasanya kami melihat sasarannya dulu, ini untuk anak muda, orang tua, atau siapa. Jika anak muda ya apa yang mereka sukai biasanya, seperti futsal, kami adakan turnamen futsal, missal konser

kita coba adakan konser yang dibalut dengan nuansa PPP. Ya seperti itulah”¹⁰³

Eksistensi PPP untuk para pemuda memang lagi di gencarkan, apa lagi selama ini PPP terkenal sebagai partainya orang tua. Maka dari itu kegiatan-kegiatan kepemudaan mulai di gencarkan. Sebagai kiprah dimasyarakat PPP berupaya mencari perhatian anak muda dengan seperti apa yang sudah disampaikan narasumber diatas, mengadakan konser music, turnamen olahraga dan hal-hal yang disukai anak muda.

2) Strategi Komunikasi Politik PPP Kabupaten Semarang Untuk Kalangan Pemilih Orang Tua

Untuk menggaet dukungan dari pemilih kalangan orangtua PPP Kabupaten Semarang melakukan strategi komunikasi politik dengan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, ulama’, pondok pesantren dan majelis taklim. Salah satu bentuk nyata strategi komunikasi politik adalah sebagai berikut:

Seperti Ziarah ke Makam Kyai-Kyai besar di Kabupaten Semarang, ziarah ke makam orang-orang PPP terdahulu yang ikut berjuang di PPP Kabupaten Semarang, dan seperti halnya untuk ibu-ibu ada kegiatan

¹⁰³ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

pelatihan dan lomba seperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Untuk target orang tua atau ibu - ibu kita biasanya mengadakan ziarah-ziarah, selain ke walisongo yak e akan kyai-kyai yang ada di Searang, kemudian ke makam orang-orang PPP terdahulu, kalau gak ya silaturahmi kerumahnya, hal itu juga cukup menarik perhatian masyarakat setidaknya ada gambaran bahwa PPP itu peduli. Kusus ibu ibu ya pelatihan masak atau lomba nyanyi mars PPP. Itu juga merupakan salah satu upaya kami dalam membangun citra public, atau strategi dalam pendulangan suara PPP di Kabupaten semarang.”¹⁰⁴

Dari pernyataan diatas, kiprah PPP di masyarakat dalam membangun citra publik cukup lengkap dengan melihat sasran berdasarkan umur masyarakat yang ada. Hal ini menjadi catatan baik bagi PPP itu sendiri dalam masyarakat.

3) Strategi Komunikasi Politik PPP Kabupaten Semarang melalui media masa sosial.

Peran media masa sosial semakin penting seiring meningkatnya pengguna internet di masyarakat. Ada beberapa sederetan contoh untuk melihat bagaimana *platform* ini memberdayakan masyarakat dan dapat

¹⁰⁴ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

memberi citra untuk partai politik. Namun, media masa juga menjai ruang paling efektif untuk penyebaran berita palsu dan hoaks yang marak terjadi.

Ironisnya, dalam kenyataannya semacam itu partai politik belum secara serius menggunakan media sosial sebagai platform yang bisa menyebarkan gagasan-gagasannya. Yang paling menonjol sejauh ini justru akun-akun pribadi politikus yang punya banyak pengikut di media sosial. Dari pada akun partai politiknya itu sendiri.

seperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“untuk akun media sosial kami PPP belum bisa memanfaatkannya secara maksimal, kami belum mempunyai web secara khusus untuk PPP Kabupaten Semarang, dan untuk media sosial lainnya seperti FB kami punya itu yang kemaren namanya Badan Pemenangan Pemilu DPC PPP Kab. Semarang. Selain itu juga saya juga aktif di media sosial saya sendiri. Karena biasanya para anggota termasuk saya lebih suka menulis dan eksis di akun pribadi”.¹⁰⁵

Dalam kiprahnya di masyarakat komunikasi Politik PPP Kabupaten Semarang melalui media masa sosial masih belum maksimal, itu bisa dilihat dari belum memilikinya web, blog, twitter, Facebook ataupun Instagram khusus partai dan akun media

¹⁰⁵ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

sosialnya hanya digunakan menjelang pemilu saja. Selain media sosial internet PPP Kabupaten juga membangun citra publiknya melalui spanduk, baliho, dan symbol-simbol partai yang di pasang di daerah pemilihannya.

B. Faktor-Faktor Tantangan Dan Hambatan Dalam Pelembagaan Partai

Dari kesimpulan dan penjelasan di bab-bab sebelumnya, faktor hambatan dan tantangan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang. Dapat dikemukakan bahwa secara garis besar PPP Kabupaten Semarang menurut penulis sedang menghadapi dua tantangan besar yang saling terkait, yakni tantangan internal dan eksternal.

Tantangan dan hambatan internal dan eksternal dalam pelembagaan PPP Kabupaten Semarang tidaklah jauh seperti halnya PPP secara nasional. Kembalinya PPP kepada asas Islam dan lambang Kak'bah', sekalipun dalam makna pragmatis, untuk berebut massa tradisional, dapat dikatakan belum menjadi syarat yang mencukupi untuk menjadikan PPP sebagai partai yang besar dan modern. Bahkan dimungkinkan yang terjadi justru sebaliknya, sikap kritis masyarakat yang semakin meningkat tidak lagi memberi tempat eksploitasi sentiment untuk kepentingan sesaat. Kebesaran

PPP di masa depan sepenuhnya berkenaan dengan kemampuannya menjawab dua tantangan besar itu.¹⁰⁶

seseperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Secara mendasar tantangan PPP ya kurang lebih hampir sama dengan PPP secara nasional, tentunya seperti halnya pelebagaan partai yang meliputi faktor internal dan eksternal. Suatu organisasi pastinya memiliki tantangan dan hambatan dalam menjalankan roda organisasi tersebut”¹⁰⁷

1. Tantangan Internal

Jika kita bertanya tentang tantangan PPP, maka terlebih dahulu kita harus melihat persoalan internal yang selama ini menghimpit kita sendiri.

a) Kaderisasi SDM

Melihat SDM PPP, baik di tingkat Dewan Pimpinan Partai (DPP,DPW dan DPC) maupun ditingkat lembaga legislative (fraksi PPP di DPR maupun DPRD) bagaimanapun secara umum masih dibawah standard, dan ini adalah suatu hal yang memalukan jika dibandingkan dengan politisi-politisi dari partai lainnya.¹⁰⁸ Untuk itulah

¹⁰⁶ Abdul Aziz, *POLITIK ISLAM POLITIK Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006) h.174

¹⁰⁷ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

¹⁰⁸ K.H. Salahudin Wahid, dkk, *Demokrasi, Agama dan Politik Indonesia; Menakar PPP Sebagai Kekuatan Partai Islam di Era Reformasi*, (Semarang: MataAir, 2001), h. 105

PPP sekarang tengah menggarap secara serius usaha-usaha yang mengarah kepada pemberdayaan SDM.

Seseperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Tantangan terbesar kita adalah sumber daya manusia (SDM), SDM kita banyak dari tingkat bawah, kalau sudah bicara pengurus di tingkat kecamatan (PAC), biasanya tidak berani sejajar dengan camat dan pengurus ranting tidak berani sejajar atau menjalin komunikasi dengan lurah, padahal ya tidak apa-apa. Ini semua karena mayoritas kader-kader kita berasal dari tingkat bawah, sehingga pada minder”.¹⁰⁹

Dalam hal ini PPP memiliki dua kelemahan yang menjadi tantangan *Pertama* bagi PPP untuk segera merealisasikan. secara internal PPP belum memiliki jenjang kaderisasi yang kokoh dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Padahal kaderisasi bukan sekedar gerakan untuk menjamin kesinambungan partai, namun juga sebagai wahana persemaian karakter nilai dan ideology partai terhadap kader yang akan mengelolanya kelak.¹¹⁰ *Kedua*, PPP tidak memiliki kader sayap mahasiswa. Hampir semua

¹⁰⁹ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

¹¹⁰ Abdul Aziz, *POLITIK ISLAM POLITIK Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) h.181

partai besar memiliki sayap organ mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan keterbatasan capital sosial seperti ini, sudah tentu PPP akan menemui kesulitan tatkala berusaha mengkonsolidasi organ mahasiswa yang ada lantaran gerakan-gerakan tersebut umumnya sudah masuk didalam payung partai politik yang lain.

b) Kontruksi Ideologi

Tantangan ini terdiri dari dimensi subyektif dan obyektif. Tantangan subyektif berupa pijakan ideologis, nilai-nilai, norma, dan etika yang mampu memberi orientasi bagi perjuangan, landasan aksi, dan hal yang bersifat taktis strategis. Ideology bukanlah sebagai *set of belief* , namun juga *road to action* yang memiliki relevansi baik secara sosial maupun intelektual.¹¹¹

Ideologi yang merupakan sistem nilai dan norma tentu masih bersifat abstrak. Perlu ada penjabarannya lebih lanjut. Ideologi yang dianut oleh PPP perlu diterjemahkan ke dalam hal hal yang rill dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi yang dianut oleh PPP.

¹¹¹ Abdul Aziz, *POLITIK ISLAM POLITIK Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam* (Yogjakarta, Tiara Wacana, 2006) h.175

Cara untuk menerjemahkan ideologi yang dimiliki oleh PPP ke dalam hal-hal yang riil dan konkret dirumuskan dalam bentuk *platform* partai politik. *Platform* partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan PPP dalam kontribusinya terhadap permasalahan yang ada. PPP harus memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang harus dilakukan seperti program kerja dan isu politik.¹¹²

Perkembangan terakhir praktik politik kelembagaan menunjukkan masih adanya kekurangan dalam faktor internal partai. Di saat PPP dihadapkan dengan realitas politik dan berbagai isu konflik internal maupun terjeratnya kader kedalam kasus korupsi di negeri ini. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut jikalau PPP menginginkan terbangunnya karakter kepartaian yang kuat.

Berkaitan dengan hal itu tersebut, setidaknya terdapat aspek kunci hal yang segera harus mengalami rekonstruksi, yaitu bagaimana merumuskan ideology yang transformative dan terarah, ini adalah sebuah tantangan tentunya.

Seseperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda di bab sebelumnya;

¹¹² Lili, Romli, Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. h. 26

“Kalau organisasi-organisasi sayap PPP selama ini seperti GPK ataupun WPP itu masih minim perannya dalam memberi kontribusi ke partai, yaa ada tapi masih kecil. Mereka itu seperti lahir tapi bukan dari Rahim PPP yang artinya adalah mereka ada itu ya sebatas sekumpulan kader atau anggota yang menghimpun membuat gerakan seperti itu, sudah beberapa kali di upayakan untuk mentertipkan tapi ya kalau dari PPP kabupaten semarang masih sulit, kurang tau kalau didaerah lain.”¹¹³

Salah satu kelemahan dalam tubuh PPP Kabupaten Semarang dan PPP secara nasional sendiri dalam derajat penanaman nilai atau tantangan internal dalam konstruksi ideology. Seperti apa yang telah dilakukan oleh partai besar lainnya yang banyak memiliki sayap organisasi dari bawah sampai atas seperti halnya sayap mahasiswa seperti PDIP ada GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), PKB ada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PKS memiliki KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), atau PAN yang memiliki IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah),¹¹⁴ yang tentunya penanaman nilai konstruksi ideology benar-benar sudah ditanamkan di benak mereka.

¹¹³ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

¹¹⁴ Abdul Aziz, *POLITIK ISLAM POLITIK Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) h.175

c) Basis Data

Kebijakan yang cerdas dan mengena membutuhkan basis data yang akurat dan bersifat menyeluruh. Dalam hal ini basis data tidak bisa lagi didasarkan pada asumsi subyektif ataupun data surat kabar. Kebutuhan akan basis data menjadi kian penting mengingat seperangkat data menjadi bahan baku utama untuk menyusun program, kebijakan, atau responsi.¹¹⁵ Masih lemahnya PPP Kabupaten Semarang dalam kepedulian terhadap isu-isu kerakyatan secara menyeluruh dikarenakan partai tidak memiliki data yang representatif dan proposional. Akibatnya berkembangnya ketidakpahaman terhadap isu-isu politik strategis atau bahkan dalam gambaran dinamika dan pemetaan politik di wilayah kabupaten Semarang, itu yang menjadi target dan tantangan yang harus segera diselesaikan.

Seseperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Iya sekali lagi SDM yang menjadi kelemahan dan hambatan bagi partai kami masih belum bisa sepenuhnya melihat penuh akan hal itu. Seharusnya partai itu memiliki data, wilayah sana keunggulan dan kekurangannya apa, wilayah sana apa, sehingga saat mendekati pemilu, kita bisa

¹¹⁵ Abdul Aziz, *POLITIK ISLAM POLITIK Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) h.183

memetakan dan tidak buta melihat wilayah-wilayah yang nantinya menjadi garapan”.¹¹⁶

Pentingnya informasi data yang selama ini masih belum di maksimalkan oleh PPP Kabupaten Semarang menjadi sebuah tantang internal bagi partai.

d) Basis Finansial

Dalam hal finansial, setidaknya ada dua syarat penting bagi eksistensi paratai modern (1) basis ekonomi yang kuat dan (2) manajemen keuangan yang transparan. Untuk saat ini, setiap perjuangan, termasuk didalamnya perjuangan politik, tidak mungkin berjalan tanpa adanya “gizi”, yakni basis finansial yang kuat. Dalam hal inilah PPP Kabupaten Semarang perlu membangun kemampuan untuk melakukan *fund-raising* yang kuat beserta pengelolaannya sehingga kinerja partai bisa lebih meningkat.

Seseperti apa yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda;

“Keterbatasan finansial memang sekarang ini menjadi hambatan bagi PPP Kabupaten Semarang, sekarang ini Partai politik hampir tidak dapat bergerak tanpa adanya finansial yang mendukungnya”.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Nurul Huda (Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di Rumahnya, 1 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

Jika tantangan internal PPP Kabupaten Semarang diatas sudah bisa di jawab, yakni dengan melakukan peningkatan kualitas SDMnya, melakukan rekrontruksi ideologi, basis data maupun basis finansial maka persoalan internal PPP yang utama akan terpecahkan. Selanjutnya PPP Kabupaten Semarang akan menghadapi tantangan eksternal yang menghadang, misalnya tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin terperuk, gejala politik yang mengarah ke anarkhi dan kecenderungan mementingkan kepentingan golongan, semuanya akan bisa diatasi PPP secara lbih bertanggungjawab.¹¹⁸

2. Tantangan Eksternal

Partai politik dibangun bukan sekedar unuk menjawab kebutuhan internalnya, namun juga sebagai instrument untuk menjawab tantangan – tantangan yang bersifat eksternal. Kemampuan membaca tantangan ditingkat global dan kecenderungan dimasa depan sangat mepengaruhi kinerja partai. Tantangan global yang dimaksud meliputi dua aspek tantangan, *Pertama* yaitu otonomi yaitu ekonomi, *Kedua* citra public, bagaimana masyarakat nanti melihat PPP dari keIslamannya yang akan disampaikan ke publik.

a) Ekonomi

¹¹⁸ K.H. Salahudin Wahid, dkk, *Demokrasi, Agama dan Politik Indonesia; Menakar PPP Sebagai Kekuatan Partai Islam di Era Reformasi*, (Semarang: MataAir, 2001), h. 108

Seperti juga dalam bidang lainnya, wilayah ekonomi Indonesia sudah terintegrasi di dalam sistem kapitalisme global. Sistem ini secara mendasar memberi tempat bagi kepribadian kepada masyarakat. Gelombang liberalisasi bukan hanya terjadi di sektor perdagangan, namun juga merambah pelayanan public seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.¹¹⁹

Seseperti apa yang disampaikan oleh anggota DPC PPP Kabupaten Semarang Burhan;

“Kemampuan ekonomi masyarakat basis PPP juga menjadi perhatian penting bagi partai. Karena tidak dipungkiri politik pragmatis dan politik uang sering sekali menjadi momok besar bagi kader-kader atau basis pendukung yang memiliki ekonomi bawah. Banyak kader yang hanya di imingi uang seratus dua ratus ribu kemudian berpindah haluan itu bayak, padahal sudah kami prospek sejak awal. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan dan hambatan partai”.¹²⁰

Seperti apa yang sudah disampaikan diatas, bahwasanya ekonomi juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh partai, karena rendahnya ekonomi

¹¹⁹ Abdul Aziz, *POLITIK ISLAM POLITIK Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) h.183

¹²⁰ Burhan (Anggota DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di kantor DPC PPP Kabupaten Semarang, 27 Maret 2020, pukul 11.30 WIB

masyarakat menjadikan masyarakatan mmenjadi pemilih yang pragmatis dan dapat menghilangkan nilai-nilai dalam pemilihan ataupun demokrasi.

b) Keislaman

Salah satu tantangan penting PPP adalah bagaimana melampaui *khilafah* yang tersisa, dan menjadi konsolidator kekuatan Islam. Kapasitas ini cukup dimiliki PPP mengingat partai ini secara historis bukan merupakan partai golongan tertentu saja. Jadi, tidak seperti PAN atau PKB, yang meski mengaku bersifat terbuka, tidak dapat dipisahkan dari Muhammadiyah dan NU. PPP memiliki modal kultural dan modal sosial untuk memainkan peran konsolidator tersebut. Peran ini diarahkan untuk membangun keislaman yang lebih berbasis pada isu-isu kerakyatan ketimbang isu-isu pinggiran. Tetapi kenyataannya hal itu menjadi salah satu hambatan bagi partai untuk bergerak lebih dinamis mengikuti dinamika politik yang ada. PPP dengan keIslamannya terlalu kaku dan belum bisa mengikuti partai lainnya.

Seseperti apa yang disampaikan oleh anggota DPC PPP Kabupaten Semarang Burhan;

“PPP selama ini menurut saya masih kaku, belum bisa mengikuti dinamika politik yang ada, analoginya partai ini seperti orang tua yang hanya berjalan lurus tidak mau bahwa yang dihadapi setiap tahunnya itu berbeda-

beda, dan ini menjadi tugas kami bersama nantinya di partai”.¹²¹

Sikap seperti diatas disebut menjadi hambatan bagi partai, partai perlu gaya yang modern tidak kaku dalam pemikiran ataupun keislaman. Partai harus bisa mengikuti dinamika politik yang ada tanpa mengurangi nilai-nilai PPP itu sendiri.

¹²¹ Burhan (Anggota DPC PPP Kabupaten Semarang), diwawancarai oleh penulis, Recording, di kantor DPC PPP Kabupaten Semarang, 27 Maret 2020, pukul 11.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelembagaan PPP Kabupaten Semarang tahun 2014-2019 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelembagaan PPP Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang sudah cukup berhasil membangun pelembagaan yang lebih baik. Keberhasilan pelembagaan yang lebih baik itu bisa dilihat dari hasil pada pemilu 2019 yang mengalami kenaikan jumlah perolehan suara dari pada pemilu 2014 sebelumnya. Hal itu dilihat dari beberapa poin dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya.

Pertama, Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang dalam Derajat Kesisteman yang meliputi keutuhan organisasi masih terjaga dengan baik. Ketegasan dan kesolitan pengurus DPC Kabupaten Semarang berhasil meredam isu dualisme partai dan

perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah yang sesuai dengan AD/ART.

Dari segi Kaderisasi PPP Kabupaten Semarang sudah menjalankan proses kaderisasi sesuai apa yang ada didalam AD/ART. Dari anggota biasa, anggota kader dan anggota kehormatan semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada didalam AD/ART. Walaupun masih ada beberapa catatan atau kekurangannya secara internal PPP Kabupaten Semarang belum memiliki jenjang kaderisasi yang kokoh dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi.

Kedua, PPP Kabupaten Semarang dari segi derajat penanaman nilainya atau ideologinya sudah sangat jelas bahwa PPP Kabupaten Semarang adalah partai Islam, basis pendukungnya adalah masyarakat Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Dari segi Klientalisme partai, klientisme dalam PPP Kabupaten Semarang masih tinggi, di mana beberapa anggota yang bergabung tidak didasarkan karena kesamaan ideologi maupun *platform* dari partai, tetapi cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai). Dan mereka yang bergabung menjadi anggota hanya

didasarkan karena adanya hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan salah seorang elit partai.

Ketiga, dalam derajat otonomi dari segi keuangan partai, PPP Kabupaten Semarang masih mengandalkan dana dari APBD dan potongan fraksi dari anggota DPR dan iuran khas anggota setiap bulannya. Walaupun demikian PPP Kabupaten Semarang mampu memberi 500 ribu per ranting di setiap bulannya untuk mendukung kinerja dari ranting-ranting tersebut.

Keempat, dalam derajat pengetahuan publik, PPP Kabupaten Semarang sudah memenuhi indikator pemlembagaan menurut derajat pengetahuan publiknya, dalam kiprahnya di dalam politik lokal dan kiprahnya di masyarakat. PPP Kabupaten Semarang sekarang berhasil membangun citranya dengan baik ditengah isu dan sederet kasus yang menimpa partai berlammbang Kak'bah' ini.

Strategi komunikasi dengan membagi Antara kalangan uda dan kalangan muda cukup efektif. Dimana program dan kegiatan pengenalan partai dapat diterimma dengan baik. Selain itu juga membangun citra public dengan media massa social juga sudah diterapkan, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Tapi hasil pemilu 2019 kemaren menunjukkan bahwa pelembagaan PPP

Kabupaten Semarang dalam derajat pengetahuan publiknya sudah berhasil.

2. Tantangan dan Hambatan

Dari kesimpulan dan penjelasan di bab-bab sebelumnya, faktor hambatan dan tantangan PPP Kabupaten Semarang. Dapat dikemukakan bahwa secara garis besar PPP Kabupaten Semarang menurut penulis sedang menghadapi dua tantangan besar yang saling terkait, yakni tantangan internal dan eksternal.

Tantangan internal dari Kaderisasi SDM, basis data, finansial dan penanaman nilai atau ideology masih menjadi PR besar bagi PPP Kabupaten Semarang. Kurangnya SDM yang berkualitas menjadi hambatan bagi partai untuk lebih berkembang dan maju. Selain itu juga penanaman nilai atau ideology, bagaimana ideologi dapat dipahami oleh seluruh lapisan partai, dari elite tertinggi sampai dengan massa terendah. Nilai partai tidaklah dimaksudkan sebagai seperangkat teori yang solit dan tebal, namun sebagai konstruksi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dapat diterapkan oleh masyarakat secara sadar.

Tantangan eksternal, sebagai suatu organisasi, eksistensi partai secara mendasar direfleksikan oleh program-program yang disusun dan dilaksanakannya. Program-program yang disusun pun sesungguhnya merepresentasikan cara pandang atau penafsiran partai terhadap realitas historis. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi dilakukan untuk memenuhi dua kepentingan sekaligus: di satu sisi, merupakan kebutuhan kelembagaan, dan di sisi lain, menjadi respons atas kondisi social politik kotemporer seperti ekonomi. Seperti apa yang sudah disampaikan diatas, bahwasanya ekonomi juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh partai, karena rendahnya ekonomi masyarakat menjadikan masyarakatan mmenjadi pemilih yang pragmatis dan dapat menghilangkan nilai-nilai dalam pemilihan ataupun demokrasi.

B. SARAN

1. Penting ditekankan oleh PPP Kabupaten Semarang adalah mentransformasikan basis ideology agar tidak bersifat kaku dan konfrontatif, serta membangun kaderisasi yang baik untuk mencetak SDM yang berkualitas dan profesional.
2. Kelemahan PPP Kabupaten Semarang dalam menterjemahkan basis ideologinya secara kontekstual pada akhirnya akan menjerumuskan praktik pragmatism politik. Maka pragmatism

politik harus dilakukan atas dasar kelembagaan yang kuat dan kemampuan dalam berpolitik.

3. Kekompakan seluruh kader dan ketegasan pemimpin PPP Kabupaten Semarang harus tetap dijaga dengan baik, untuk menjaga keutuhan organisasi di tengah sederet kasus yang menimpa PPP.
4. Komunikasi melalui media social harus lebih ditingkatkan, karena hampir semua masyarakat sekarang sudah menggunakan media social, dari kalangan muda sampai tua.

C. PENUTUP

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiqNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam

penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dari Buku

Amal Ichlasul, *Teori-Teori Muthakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: tiara wacana, 2012)

Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1996)

Aziz, Abdul. *Politik islam politik pergulatan ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Cholisin dan Nasiwan, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012)

Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Lexy Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)

Qodir, Zuly, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Qodir Zuly, *Teori Dan Praktik Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Grasindo, 2010)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Wahid, Salahudin. *Demokrasi, Agama dan Politik Indonesia. Menakar PPP Sebagai Kekuatan Partai Islam di Era Reformasi*, (Semarang: MataAir, 2001)

Sumber Dari Jurnal

Bakar, abu, *Politik Dinasti Dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP Dan Keluarga Banteng Di Kepulauan Selayar* Vol. 1, No. 2, 2013.

Jurnal Party Politics Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 2002 tentang [pelembagaan partai politik](#)

Nurlatipah Nasir, Nurlatipah, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Volume 04, No. 1 Tahun 2016

Pamungkas, Sigit, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

Randal, Vicky dan Svasand, tentang “Party Institutionalization in New Democracies”, *Party Politics*, SAGE Publications, Volume 8, No. 1, Januari, 2002

Romli, Lili. 2012. *Pelembagaan Partai Politik Era Reformasi*. Makalah dalam seminar “Pelembagaan Partai Politik”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta

Sumber Dari Internet

Surbakti, Ramlan “Tingkat Pelembagaan Partai Politik”, *Kompas*, 6 Januari 2003.

Ranin, agung, “*Beberapa Parpol Memberikan Kejutan Dalam*”
<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/183504/beberapa-parpol-memberikan-kejutan, 02-10-2019>. di akses pada 3 Februari 2020, pukul 09.30 WIB

Jessi, Carina, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all, 02-11-2019> di akses pada 3 Februari 2020, pukul 10.00 WIB

<https://www.satukanindonesia.com/2018/partai-persatuan-pembangunan-ppp/> di akses pada 18 April 2020, pukul 12.51 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. 024 76433880 Semarang 50183

Nomor : B-1536/Un.10.6/K/TL.00.9/12/2019
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian Skripsi

18 Desember 2019

Kepada Yth,
Ketua Fraksi PPP
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian. Sehubungan dengan itu, kami memohon izin agar mahasiswa berikut diperkenankan melaksanakan penelitian tentang Pelembagaan Partai Islam (Studi tentang Pelembagaan Partai PPP tahun 2014-2019)

Nama : Setyo Wahyu N
NIM : 1506016006
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan
Kampus Tata Usaha
Muhammad Royani

Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran 2. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 76435986

Nomor : B-1509 /Un.10.6/J2/PP.00.9/12/2019

Hal : Penunjukan Pembimbing.

Kepada Yth.

1. Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.

2. Rofiq, M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo

Di Semarang.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah mempertimbangkan aspek akademik dan administratif, dengan ini Ketua Jurusan Ilmu Politik menunjuk Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : SETYO WAHYU NARYONO

NIM : 1506016006

Semester : I X

Judul Skripsi : Pelembagaan Partai Islam (Studi Tentang Pelembagaan Partai PPP tahun 2014 - 2019)

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang 13 Desember 2019

A.n Dekan

Ketua Jurusan




H. Adib, S.Ag, M.Si ✎

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dekan FISIP UIN Walisongo
2. Arsip.

Lampiran 3. Surat Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp./ Fax. (024) 6921250
UNGARAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR :070/2333/XII/2019

Dasar : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Rincian Tugas BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

Menimbang : SURAT DEKAN FISIPOL UIN WALISONGO SMG NOMOR : B-1536/U.n.10.6/K/TL.00.9/XII/2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019 PERMOHONAN IJIN KETERANGAN OBSERVASI.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang, memberikan Keterangan kepada :

1 Nama : SETYO WAHYU NARYONO
2 NO HP : 083162537364
3 Alamat : Dk.LOTORGO Rt.005/003 Kel.BANGO Kec.DEMAK Kab.DEMAK
4 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Untuk : MELAKUKAN IZIN KETERANGAN OBSERVASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN/PENYELESAIAN PROPOSAL

a. Permohonan Data : PELEMBAGAAN PARTAI ISLAM (Studi Tentang Pelembagaan Partai PPP Tahun 2014-2019)
b. Tempat / Lokasi : KPU Kabupaten Semarang
c. Bidang penelitian : FISIPOL
d. Waktu penelitian : 23 DESEMBER 2019 S/D 15 JANUARI 2020
e. Penanggung Jawab : Muhammad Royani.
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : UIN WALISONGO SMG

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi.
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan ;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang ;
d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya ;
e. Surat Keterangan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

23 Desember 2019
KABUPATEN UNGARAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SEMARANG
Drs. HANS PRANOWO
Pejabat Tingkat I
NIP. 19620824198503 1 017

Tembusan Kepada Yth :
1 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang
2 Kepala KPU Kabupaten Semarang ;
3 Dekan UIN WALISONGO SMG ;
4 Sdr yang bersangkutan ;

Lampiran 4. Formulir Permohonan Informasi Publik

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No.Pendaftaran (diisi petugas)*: 062

Nama : Setya Widyawan
Alamat : Jl. Beringin K.S/S Bangs Dendak
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon/E-mail : 083142327564
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahan kertas bila perlu) : Hasil pemilih PRK 2010-2019 dan semua data di Kab. Bang

Tujuan Memperoleh Informasi : observasi pelaksanaan pembuatan proposal skripsi

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
 E-mail

Unggahan (tempat) 11-12 (tanggal/bulan/tahun)
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
Nama dan Tanda Tangan : Surs
Nama dan Tanda Tangan : Surs

Keterangan :
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik
**Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)
***Coret yang tidak perlu

Lampiran 5. Surat Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl Jalan Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986, Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: B-355 /Un.10.6/K/PP.00.9/3/2020	Semarang, 4 Maret 2020
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Penelitian Skripsi	
Kepada Yth. Kepala KESBANGPOL. Kabupaten Semarang di Semarang		
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan Data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul : <i>"Pelebangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019 "</i> di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Nama	: SETYO WAHYU NARYONO	
NIM	: 1506016006	
Semester	: X (sepuluh)	
Jurusan	: Ilmu Politik	
Tempat/ Tgl lahir	: Demak, 21 September 1995	
Alamat	: Ds. Bango RT 05 RW 03 Kecamatan Demak Kabupaten Demak	
CP/e-mail	: 083162537364	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
		Asst. Kab. Kota Usaba Rohandi Royani
Tembusan Yth. Dekan Fakultas FISIP UIN Walisongo Semarang		
D:\Surat 2020\Fangantar Penelitian.docx		

Lampiran 6. Foto wawancara



Wawancara Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang

Lampiran 7. Foto wawancara



Wawancara Seketaris DPC PPP Kabupaten Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Demak tanggal 21 September 1995. Terlahir di keluarga sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu pada tahun 2001, penulis mengawali pendidikannya di TK Pertiwi Bango, Demak. Pada tahun 2007 penulis menyelesaikan studinya di SD N Bango 2 Demak dan pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan di Mts Al-Irsyad Gajah, Demak.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Al-Irsyad Gajah, Demak dengan tahun kelulusan 2013. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis aktif dalam kegiatan internal dan eksternal kampus. Pada tahun 2016 penulis terpilih sebagai Ketua HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada tahun 2016-2018 penulis terdaftar sebagai anggota UKM Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) UIN Walisongo Semarang. Penulis juga aktif di organisasi daerah (IMADE).